BAB V

ARAH BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA TAHUN 2023: MENJAGA STABILITAS, MENDORONG AKSELERASI PEMULIHAN

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2023 terus diarahkan untuk memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan perekonomian dalam sinergi yang erat dengan kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan moneter Bank Indonesia akan terus diarahkan menjaga stabilitas (*pro-stability*), sementara kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (*pro-growth*). Sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan ekonomi nasional akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di lintasan jangka menengah menuju Indonesia Maju.

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2023 akan terus diarahkan untuk memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan perekonomian dalam sinergi yang erat dengan kebijakan ekonomi nasional. Arah bauran kebijakan tersebut sekaligus untuk menangkal dampak rambatan dari gejolak global, baik risiko resesi ekonomi dan tingginya inflasi, berlanjutnya kebijakan suku bunga tinggi di berbagai negara utama dunia, risiko tekanan pelemahan nilai tukar Rupiah karena dolar AS yang sangat kuat, maupun berlanjutnya ketidakpastian yang tinggi di pasar keuangan global. Untuk itu, kebijakan moneter Bank Indonesia akan terus diarahkan menjaga stabilitas (*pro-stability*), khususnya pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta dukungan terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sementara itu, 4 (empat) kebijakan Bank Indonesia lainnya akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (*pro-growth*) (Gambar 5.1). Kebijakan makroprudensial longgar tetap dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM serta KUR guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan inklusi ekonomi dan keuangan hijau. Digitalisasi sistem pembayaran berdasarkan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 terus didorong untuk mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital, kerja sama sistem pembayaran antarnegara, serta pengembangan Rupiah Digital. Akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan, pembangunan infrastruktur pasar uang, serta pengembangan instrumen pembiayaan. Perluasan program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi-keuangan syariah juga terus ditempuh untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut juga didukung oleh penguatan sinergi kebijakan dengan Pemerintah, KSSK, industri keuangan, dunia usaha, dan asosiasi untuk memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan perekonomian nasional kembali ke lintasan jangka menengah-panjang menuju Indonesia Maju.

Gambar 5.1. Arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia 2023

5.1

Arah Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2023 akan difokuskan pada stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi agar kembali ke sasaran lebih awal sebagai bagian langkah mitigasi terhadap dampak rambatan gejolak global. Arah kebijakan tersebut ditempuh mengingat gejolak global telah dan akan berdampak pada kinerja perekonomian nasional, termasuk inflasi, nilai tukar, dan aliran modal asing. Kenaikan harga energi dan pangan global memberikan tekanan pada tingginya inflasi dan kemampuan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik di berbagai negara. Kenaikan suku bunga the Fed untuk merespons tingginya inflasi di Amerika Serikat, dan sangat kuatnya dolar AS juga menyebabkan tekanan pelemahan berbagai mata uang dunia, termasuk Indonesia. Tekanan terhadap nilai tukar, stabilitas moneter, fiskal, dan sistem keuangan tersebut akan makin besar, manakala juga terjadi persepsi risiko yang tinggi dan perilaku "*cash is the king*" investor global sehingga mendorong arus keluar investasi portofolio, khususnya dari SBN.

Untuk memitigasi trilema kebijakan moneter terhadap dampak rambatan gejolak global tersebut, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan 3 (tiga) instrumen kebijakan moneter, yaitu kebijakan suku bunga, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan memperkuat kecukupan cadangan devisa (Gambar 5.2). Kebijakan suku bunga diarahkan untuk menjaga inflasi inti *(core inflation)* tetap terjaga dalam kisaran 3,0±1%, bersinergi erat dengan Pemerintah dalam mengendalikan inflasi kelompok harga diatur pemerintah *(administered prices)* dan harga makanan bergejolak *(volatile food)*. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dilakukan untuk memitigasi dampak rambatan gejolak global terhadap pengendalian inflasi maupun terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Stabilisasi nilai tukar sangat penting untuk mengendalikan dampak harga energi dan pangan global yang tinggi terhadap inflasi di dalam negeri *(imported inflation)*. Bank Indonesia juga melanjutkan penjualan/pembelian SBN di pasar sekunder untuk menjaga daya tarik imbal hasil SBN *(twist operation)* guna mendorong kembali masuknya aliran investasi portofolio asing sehingga mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah dan kecukupan cadangan devisa.

Gambar 5.2. Arah Kebijakan Moneter Bank Indonesia 2023

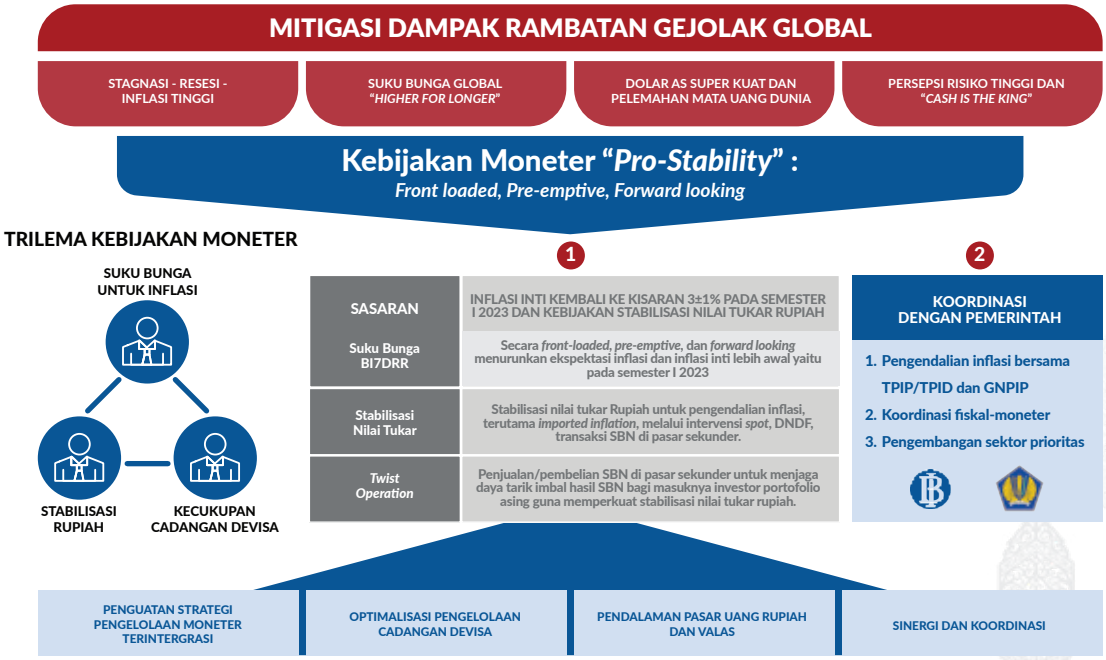

Sumber: Bank Indonesia

5.1.1. Kebijakan Suku Bunga

Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan suku bunga BI7DRR secara *front-loaded*, *pre-emptive*, dan *forward looking* untuk memastikan terus menurunnya ekspektasi inflasi dan inflasi sehingga inflasi inti tetap terjaga dalam kisaran 3,0±1%. Di tengah tingginya harga komoditas global, koordinasi kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia yang sangat erat untuk bersama memitigasi dampak tingginya harga energi dan pangan global terhadap pengendalian inflasi di dalam negeri memiliki peran yang sangat penting. Pada 2023, berdasarkan APBN 2023, Pemerintah akan tetap memberikan subsidi energi dan bantuan sosial kepada masyarakat kecil. Dengan subsidi ini, tekanan inflasi IHK dari harga-harga yang diatur Pemerintah (*administered prices*) diprakirakan akan rendah. Di samping itu, koordinasi erat Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan Bank Indonesia untuk pengendalian inflasi kelompok pangan bergejolak (*volatile food*) melalui Tim Pengendalian Inflasi di pusat dan daerah (TPIP-TPID), serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) juga akan makin ditingkatkan.

Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia akan menempuh kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk memastikan terus turunnya ekspektasi inflasi dan inflasi sehingga inflasi inti tetap terjaga dalam kisaran 3,0±1%. Bank Indonesia akan secara konsisten melakukan kalibrasi secara terukur (*well-calibrated*), perencanaan secara matang (*well-planned*), dan komunikasi secara transparan (*well-communicated*) terhadap respons kebijakan suku bunga lebih lanjut. Besaran dan waktu respons kebijakan suku bunga akan didasarkan pada perkembangan kondisi perekonomian khususnya mengenai ekspektasi inflasi dan inflasi inti dibandingkan dengan prakiraan awal dan sasaran yang perlu dicapai (*data dependent*). Respons kebijakan juga akan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan penyaluran kredit perbankan. Selain itu, perkembangan perekonomian global, khususnya yang berdampak terhadap stabilitas nilai tukar Rupiah dan daya tarik imbal hasil SBN, juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan respons suku bunga kebijakan.

> Respons kebijakan suku bunga akan didasarkan pada perkembangan kondisi perekonomian, khususnya ekspektasi inflasi dan inflasi inti, serta dilakukan secara terukur (*well-calibrated*), perencanaan secara matang (*well-planned*), dan komunikasi secara transparan (*well-communicated*)

Kenaikan suku bunga kebijakan BI7DRR untuk pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah diprakirakan tidak akan mengganggu intermediasi, sejalan dengan kondisi likuiditas longgar yang akan terus dipertahankan. Bank Indonesia berkeyakinan bahwa dampak kenaikan suku bunga BI7DRR terhadap suku bunga kredit perbankan dan *yield* SBN jangka menengah-panjang tidak akan terlalu besar, meskipun terjadi penyesuaian pada suku bunga PUAB, suku bunga deposito, dan *yield* SBN jangka pendek. Terbatasnya kenaikan suku bunga perbankan dan *yield* SBN jangka tersebut didukung oleh kondisi likuiditas perbankan dan perekonomian longgar yang akan dipertahankan Bank Indonesia. Dengan demikian, kenaikan suku bunga kebijakan untuk pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah tersebut tidak akan mengganggu kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit kepada dunia usaha dan pembelian SBN untuk pembiayaan fiskal sehingga mendukung stabilitas moneter dan sistem keuangan maupun pertumbuhan ekonomi nasional.

5.1.2. Kebijakan Stabilisasi Nilai Tukar

Bank Indonesia akan terus menempuh kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk memitigasi dampak rambatan gejolak global terhadap pengendalian inflasi maupun terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kenaikan suku bunga the Fed (*Federal Funds Rate, FFR*) yang agresif selama 2022 dan penguatan dolar AS

memberikan tekanan pelemahan berbagai mata uang dunia, termasuk Indonesia. Stabilitas nilai tukar Rupiah sangat penting untuk mengendalikan dampak harga energi dan pangan global terhadap inflasi di dalam negeri (*imported inflation*). Stabilitas Rupiah juga penting untuk turut menjaga kinerja fiskal Pemerintah, khususnya dalam menjaga daya tarik *yield* SBN untuk kebutuhan pembiayaan APBN. Selain itu, stabilitas Rupiah juga berpengaruh positif terhadap stabilitas sistem keuangan. Perkembangan nilai tukar akan berpengaruh terhadap kondisi neraca perbankan dan neraca korporasi. Nilai tukar yang stabil juga dapat menjaga keyakinan pengusaha dan masyarakat.

Kebijakan stabilisasi nilai tukar dilakukan melalui *triple intervention* untuk menjaga nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Bank Indonesia memprakirakan bahwa tekanan pelemahan nilai tukar akan mereda menjelang dan setelah kenaikan FFR yang mencapai puncaknya pada triwulan I 2023. Nilai tukar Rupiah diprakirakan akan bergerak menguat dan stabil setelah triwulan I 2023 sejalan dengan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat. Kuatnya fundamental ekonomi Indonesia didukung oleh inflasi yang akan menurun ke arah sasaran, neraca transaksi berjalan yang surplus, imbal hasil *yield* SBN yang menarik, serta prospek pemulihan ekonomi nasional yang terus berlanjut. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar dimaksud, Bank Indonesia akan terus memonitor dan berada di pasar, serta menempuh kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah yang diperlukan, melalui *triple intervention*, di pasar spot, DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder. Penguatan strategi operasi moneter juga akan ditempuh untuk mendukung efektivitas kenaikan suku bunga BI7DRR dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah tersebut. Selain itu, Bank Indonesia akan terus menjaga dan meningkatkan kecukupan cadangan devisa, baik melalui optimalisasi pengelolaan cadangan devisa maupun dengan meningkatkan pasokan valas di pasar dari repatriasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Koordinasi Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan yang selama ini terjalin erat akan terus diperkuat untuk tetap menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan stabilitas pasar SBN dalam mengelola penyesuaian perkembangan global pada 2023.

Selain itu, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan penjualan/pembelian SBN di pasar sekunder untuk menjaga daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portofolio asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah. Kenaikan FFR secara agresif untuk menurunkan sangat tingginya inflasi di AS yang telah mendorong kenaikan *yield* US Treasury dan nilai tukar dolar AS yang sangat kuat, tingginya persepsi risiko, dan perilaku "*cash is the king*" investor global telah mendorong gejolak keuangan global dan menyebabkan tekanan depresiasi seluruh mata uang dunia, termasuk Rupiah, dan arus keluar investasi portofolio dalam jumlah besar dari negara berkembang, termasuk Indonesia khususnya dari SBN. Untuk mengatasi hal tersebut, Bank Indonesia berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan untuk bersama-sama menempuh langkah-langkah untuk menjaga daya tarik imbal hasil SBN guna mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah. Untuk itu, Bank Indonesia menempuh inovasi kebijakan berupa "*twist operation*", yaitu penjualan/pembelian SBN di pasar sekunder, untuk menjaga daya tarik imbal hasil SBN sehingga mendukung masuknya aliran investasi portofolio asing (Gambar 5.3).

Strategi "*twist operation*" ditempuh dengan melakukan penjualan SBN jangka pendek dan pembelian SBN jangka panjang. Penjualan SBN jangka pendek ditempuh untuk menaikkan imbal hasil SBN jangka pendek sejalan dengan suku bunga BI7DRR dan mendorong aliran masuk investasi portofolio sehingga mendukung stabilisasi Rupiah. Di sisi lain, pembelian SBN jangka panjang ditempuh dengan menjaga agar kenaikan *yield* SBN tidak berlebihan sehingga tidak mengganggu penerbitan SBN jangka panjang 2023, namun tetap kompetitif dalam menarik aliran masuk investasi portofolio. Sementara itu, Kementerian Keuangan di samping tetap secara terjadwal menerbitkan SBN di pasar perdana, juga melakukan penerbitan obligasi global serta penarikan pinjaman program dari lembaga multilateral dan regional untuk pembiayaan APBN. Dengan penerbitan obligasi dan penarikan pinjaman program tersebut, maka aliran valuta asing ke domestik akan meningkat sehingga memperkuat kecukupan cadangan devisa dan kemampuan Bank Indonesia untuk melakukan stabilisasi nilai tukar Rupiah.

Gambar 5.3. Arah Kebijakan "*Twist Operation*" Moneter 2023

$$R_t = R_t^* + E(S_t) + \rho_t$$

R_t = *Yield SBN tenor t*
R_t^* = *Yield US Treasury tenor t*
$E(S_t)$ = *Ekspektasi depresiasi Rupiah*
ρ_t = *Premi risiko Indonesia*

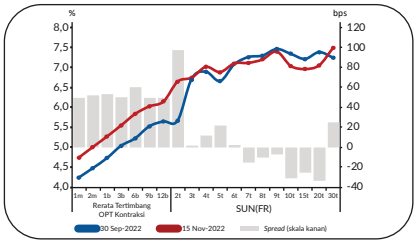

BANK INDONESIA "*TWIST OPERATION*"

PENJUALAN SBN JANGKA PENDEK
- *YIELD* SBN NAIK SEARAH BI7DRR,
- ALIRAN MASUK INVESTASI PORTOFOLIO,
- STABILISASI RUPIAH
- PEMBIAYAAN FISKAL TIDAK TERPENGARUH

PEMBELIAN SBN JANGKA PANJANG
- KENAIKAN *YIELD* SBN TIDAK BERLEBIHAN,
- ALIRAN MASUK INVESTASI PORTOFOLIO,
- STABILISASI RUPIAH
- PEMBIAYAAN FISKAL TERJAGA

5.1.3. Koordinasi dalam Pengendalian Inflasi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan Pemerintah juga terus diperkuat dalam pengendalian inflasi dan mendorong sektor-sektor prioritas untuk pemulihan ekonomi nasional. Dalam konteks pengendalian inflasi, kebijakan suku bunga yang diarahkan untuk terus menjaga inflasi pada kisaran 3,0 ±1,0% pada 2023 dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk mengendalikan inflasi dari *imported inflation* akan diperkuat dengan koordinasi kebijakan fiskal-moneter. Subsidi energi dan bantuan sosial kepada masyarakat kecil yang tetap diberikan oleh Pemerintah pada 2023 diprakirakan akan mendukung rendahnya tekanan inflasi IHK dari harga-harga yang diatur Pemerintah *(administered prices)*. Sinergi erat Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi di pusat dan daerah (TPIP-TPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) juga akan makin ditingkatkan untuk pengendalian inflasi kelompok pangan bergejolak *(volatile food)*. Sinergi dan koordinasi dimaksud termasuk operasi pasar, kerja sama antardaerah, dan gerakan *urban farming* untuk pengendalian inflasi pangan bergejolak. Selain itu, Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal bagi Pemerintah Daerah yang berhasil mengendalikan inflasi pangan. Dengan eratnya sinergi dan koordinasi tersebut, Bank Indonesia meyakini inflasi inti (*core inflation*) akan tetap terjaga pada kisaran 3,0 ±1,0%, sementara inflasi IHK akan kembali ke sasaran pada awal semester II 2023 setelah pengaruh perhitungan bulan dasar (*base effect*) atas penyesuaian harga BBM September 2022 berakhir. Dalam konteks pemulihan ekonomi nasional, koordinasi untuk mendorong sektor-sektor prioritas diperkuat dengan dukungan Bank Indonesia dalam asesmen perkembangan dan permasalahan yang terjadi baik di pusat dan daerah. Selain itu, koordinasi juga dilakukan melalui pemberian rekomendasi kebijakan ekonomi nasional yang perlu ditempuh, termasuk dari hasil Kajian Ekonomi Keuangan Daerah (KEKDA) yang dilakukan oleh kantor-kantor Bank Indonesia di berbagai daerah. Koordinasi dan dukungan penuh dari Bank Indonesia juga terus diperkuat dalam pengembangan dan peningkatan UMKM dan ekonomi-keuangan syariah baik secara nasional maupun di berbagai daerah.

5.2

Arah Kebijakan Makroprudensial

Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar pada 2023 untuk meningkatkan kredit/pembiayaan perbankan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Arah kebijakan makroprudensial dimaksud tetap didasarkan pada optimalitas tiga sasaran, yaitu intermediasi seimbang, stabilitas sistem keuangan terjaga, serta inklusi ekonomi dan keuangan (Gambar 5.4). Dalam hal ini, siklus keuangan Indonesia diperkirakan baru akan mulai memasuki tahap kenaikan setelah siklus ekonomi yang mulai berada pada tahap ekspansi sejak triwulan II 2022. Berdasarkan pola historis kedua siklus tersebut pada masa lalu, Bank Indonesia memprakirakan siklus ekonomi dan keuangan akan terus meningkat hingga mencapai periode "*boom*" pada tahun 2024-2025 untuk siklus ekonomi dan tahun 2025-2026 untuk siklus keuangan (Grafik 5.1). Berdasarkan kondisi tersebut, *stance* kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dipertahankan pada tahun 2023 hingga pertengahan 2024 sebagai instrumen yang bersifat "*counter-cyclical*" untuk mendorong pembiayaan pada waktu siklus keuangan meningkat, dan kemudian diperketat pada waktu siklus keuangan hampir mencapai puncaknya agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas sistem keuangan. Dorongan peningkatan kredit/pembiayaan perbankan dengan kebijakan makroprudensial juga akan diarahkan kepada sektor UMKM dan ekonomi hijau sehingga

Grafik 5.1. Siklus Keuangan Indonesia

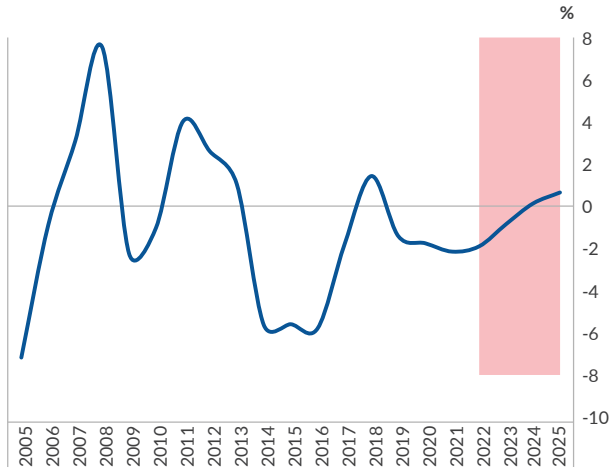

Sumber: Bank Indonesia

Gambar 5.4. Arah Kebijakan Makroprudensial 2023

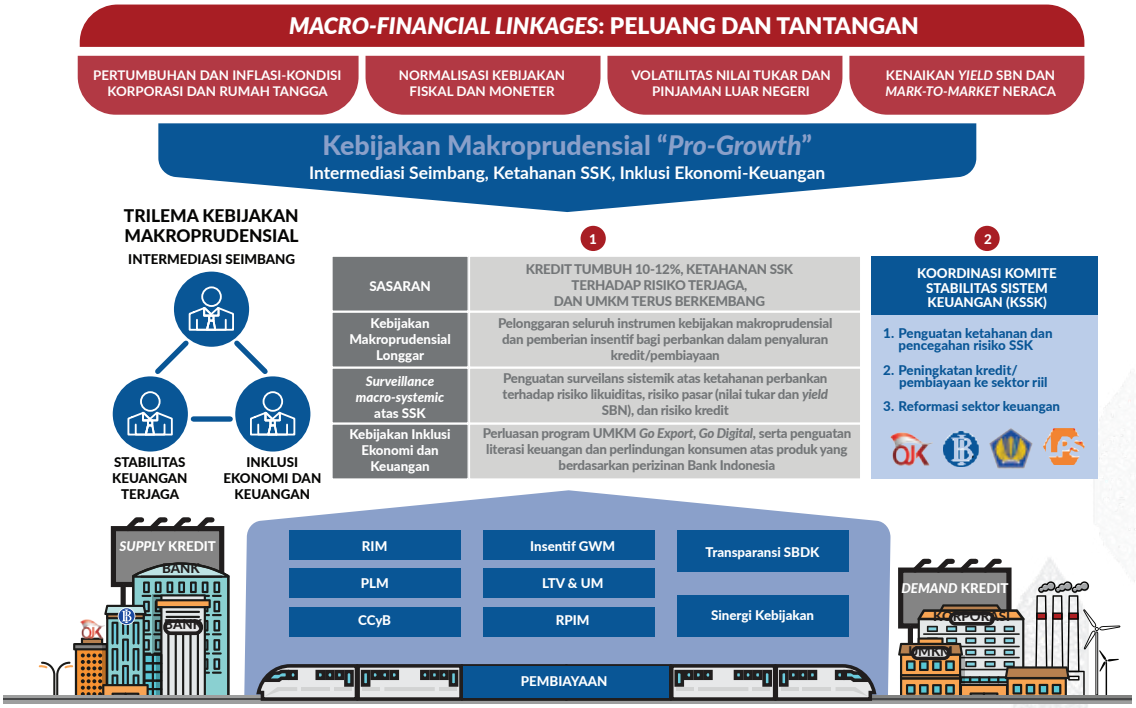

Sumber: Bank Indonesia

mendukung perluasan inklusi ekonomi dan keuangan berkelanjutan. Namun, sejumlah risiko jangka pendek dari keterkaitan makroekonomi-sektor keuangan (*macro-financial linkages*) perlu tetap diwaspadai dan karenanya perlu penguatan surveilans sistemik agar tidak menimbulkan kerentanan terhadap sistem keuangan. Penguatan surveilans sistemik dimaksud perlu dilakukan dengan uji ketahanan (*stress-test*) sektor keuangan secara individu dan sistem terhadap risiko likuiditas sejalan dengan normalisasi kebijakan fiskal dan moneter, risiko pasar baik dari volatilitas nilai tukar Rupiah maupun kenaikan suku bunga kebijakan moneter dan *yield* SBN, serta risiko kredit karena kemungkinan perlambatan ekonomi manakala restrukturisasi yang belum berakhir.

Pelonggaran seluruh instrumen kebijakan makroprudensial dan pemberian insentif bagi perbankan ditempuh dengan sasaran penyaluran kredit/pembiayaan dapat tumbuh sekitar 10-12% pada 2023 untuk mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut serta mendorong inklusi ekonomi dan keuangan berkelanjutan. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan menempuh kebijakan makroprudensial longgar melalui penetapan kembali Rasio CCyB sebesar 0%, PLM bank konvensional sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, dan PLM Syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%. Bank Indonesia juga melanjutkan pelonggaran LTV/FTV Kredit/Pembiayaan Properti menjadi paling tinggi 100% dan pelonggaran Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru yang akan tetap berlaku sampai dengan akhir Desember tahun 2023. Kebijakan makroprudensial untuk meningkatkan pembiayaan perbankan seperti Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) juga terus diperkuat guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan suku bunga dan kebijakan makroprudensial. Selanjutnya, kebijakan makroprudensial longgar dalam bentuk insentif GWM Rupiah juga diperluas untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan pada sektor-sektor prioritas, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan kredit/pembiayaan hijau sebagai bagian koordinasi kebijakan KSSK dalam pemulihan ekonomi nasional. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan kebijakan insentif GWM Rupiah termasuk peningkatan insentif pengurangan kewajiban GWM Rupiah dari maksimal 2% menjadi 2,8% dan akan berlaku sejak 1 April 2023, reklasifikasi 46 subsektor prioritas dan penyesuaian *threshold* insentif sesuai kondisi terkini, peningkatan dua kali lipat besaran insentif GWM Rupiah kepada bank penyalur KUR dan kredit UMKM berdasarkan pencapaian Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), serta pemberian insentif terhadap penyaluran kredit/pembiayaan hijau yaitu kredit/pembiayaan properti dan/atau kendaraan bermotor berwawasan lingkungan. Dengan pelonggaran kebijakan makroprudensial tersebut, Bank Indonesia meyakini siklus keuangan Indonesia akan terus meningkat dan kebutuhan kredit/pembiayaan untuk pertumbuhan ekonomi optimal akan dapat dipenuhi, bahkan RIM diprakirakan baru akan mencapai 84% pada 2024 (Grafik 5.2). Sementara itu, untuk mendukung ekonomi-keuangan inklusif khususnya UMKM, kebijakan RPIM akan terus ditingkatkan efektivitas implementasinya baik dalam bentuk upaya klasterisasi dan korporatisasi UMKM - bersinergi dengan Pemerintah, dorongan kerja sama bank dengan lembaga mitra penyalur UMKM, maupun dengan pengembangan sekuritas pembiayaan UMKM yang dapat memenuhi persyaratan. Bank Indonesia juga bersinergi dengan Pemerintah dalam perluasan akses pembiayaan serta pengembangan UMKM, termasuk kelompok berpenghasilan rendah, dan subsisten. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga bersinergi dengan KSSK dan kementerian/lembaga terkait untuk

Grafik 5.2. Proyeksi Kredit, DPK, dan RIM

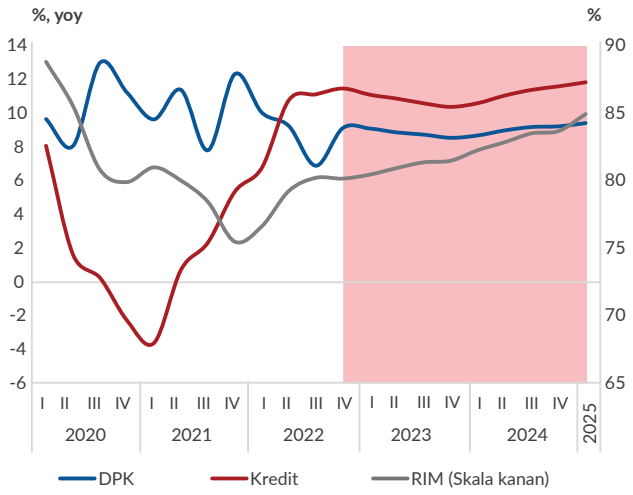

Sumber: Bank Indonesia

terus mengembangkan pembiayaan berkelanjutan (*sustainable finance*) dalam mendukung transformasi sistem keuangan hijau, termasuk kebijakan makroprudensial yang mendorong keuangan hijau dimaksud.

Peningkatan kredit/pembiayaan ke depan didukung, baik oleh tetap baiknya kapasitas penawaran perbankan maupun peningkatan permintaan dari dunia usaha seiring dengan pemulihan ekonomi nasional. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, tetap baiknya kapasitas penawaran perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan didukung oleh kondisi likuiditas yang longgar, suku bunga kredit yang masih menarik, kemampuan permodalan yang kuat, standar penyaluran kredit (*lending requirement*) yang membaik, prospek ekonomi yang akan membaik, serta kebijakan makroprudensial yang longgar. Dari sisi permintaan, peningkatan intermediasi ditopang oleh pemulihan kinerja korporasi dan rumah tangga yang terus berlanjut. Pulihnya kinerja korporasi tecermin dari perbaikan kemampuan membayar, tingkat penjualan, dan belanja modal, terutama di sektor Perdagangan dan Pertambangan. Perbaikan kinerja korporasi tersebut menunjukkan makin meredanya dampak luka memar (*scarring effect*) dari pandemi Covid-19 seiring dengan peningkatan mobilitas manusia dan pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, interaksi positif dari sisi penawaran perbankan dan permintaan korporasi tersebut terbukti dari makin banyaknya jumlah subsektor ekonomi yang berada di kuadran pertumbuhan kredit positif dan *lending requirement* longgar (Kuadran I) pada November 2022, yaitu 23 subsektor, dibandingkan dengan November 2021 sebanyak 21 subsektor (Grafik 5.3). Beberapa subsektor yang mengalami perbaikan yaitu industri barang galian bukan logam dan industri alat angkutan. Di lain pihak, jumlah subsektor ekonomi yang pertumbuhan kredit negatif dan *lending requirement* ketat (Kuadran III) menurun dari 6 menjadi 5 subsektor, termasuk diantaranya adalah subsektor angkutan (rel dan udara), pengadaan air, serta industri karet dan plastik. Bank Indonesia memandang perbankan masih dapat melonggarkan *lending requirement* pada subsektor dengan risiko kredit terjaga seiring dengan perbaikan kondisi korporasi dan pertumbuhan ekonomi ke depan. Dengan memperhatikan perkembangan tersebut dan upaya sinergis yang terus dilakukan otoritas, sektor keuangan, dan dunia usaha, Bank Indonesia meyakini proyeksi pertumbuhan kredit pada 2023 pada kisaran 10-12% (yoy) dapat dicapai. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK untuk terus mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha untuk memperkuat ketahanan dan pemulihan ekonomi nasional.

Koordinasi kebijakan dan pengawasan KSSK terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk dalam merumuskan langkah bersama guna memitigasi dampak rambatan dari gejolak global. Seperti dikemukakan sebelumnya, kondisi stabilitas sistem keuangan diprakirakan akan tetap

Grafik 5.3. Pertumbuhan Kredit dan *Lending Requirement*

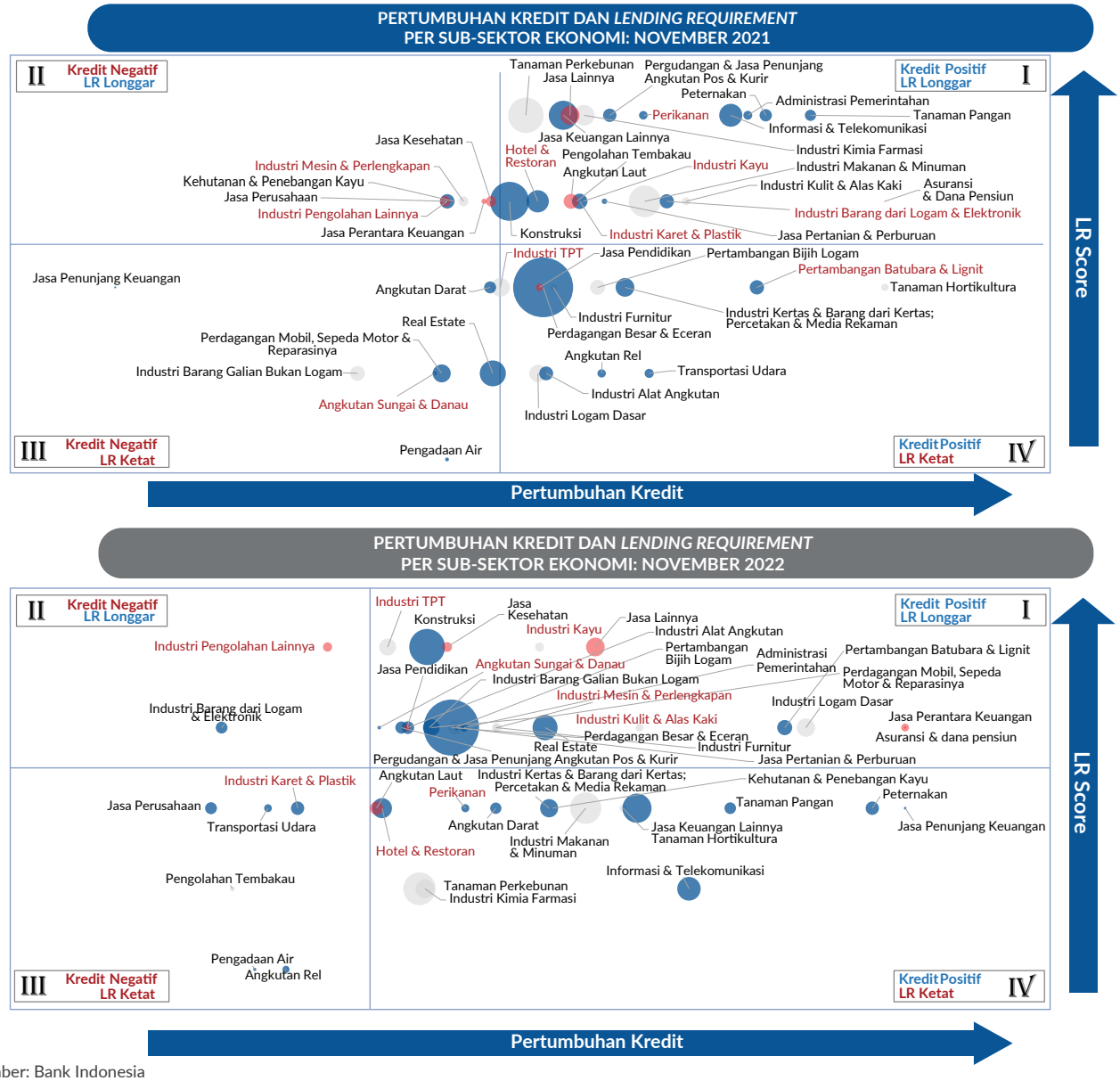

Sumber: Bank Indonesia

kuat di tengah intermediasi perbankan yang akan terus meningkat sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini terbukti dari Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) (Grafik 5.4) dan Indeks Kerentanan Sistem Keuangan (IKSK) yang disusun oleh Bank Indonesia (Grafik 5.5). Namun, sejumlah risiko jangka pendek dari keterkaitan makroekonomi-sektor keuangan (*macro-financial linkages*) perlu tetap diwaspadai agar tidak menimbulkan kerentanan terhadap sistem keuangan. Normalisasi kebijakan fiskal dan moneter akan berdampak pada penurunan likuiditas, meskipun Bank Indonesia akan memastikan kecukupannya bagi perbankan untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan pembelian SBN dari pasar perdana untuk pendanaan APBN. Volatilitas nilai tukar Rupiah maupun kenaikan suku bunga kebijakan moneter dan *yield* SBN akan meningkatkan risiko pasar bagi perbankan dan karenanya perlu penguatan manajemen risiko dan pencadangan atas kemungkinan kerugian

Grafik 5.4. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan

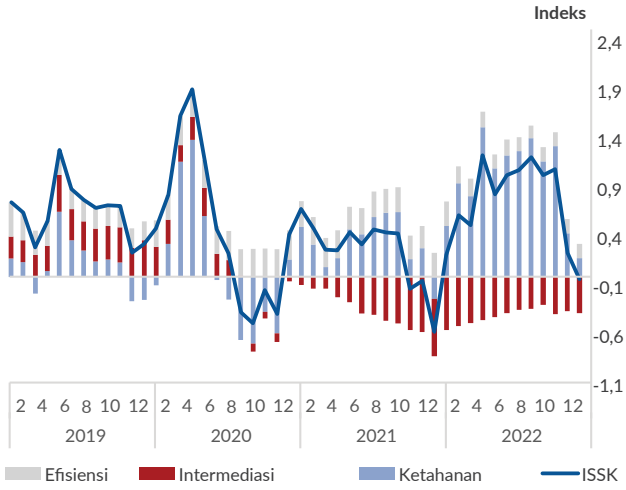

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.5. Indeks Kerentanan Sistem Keuangan

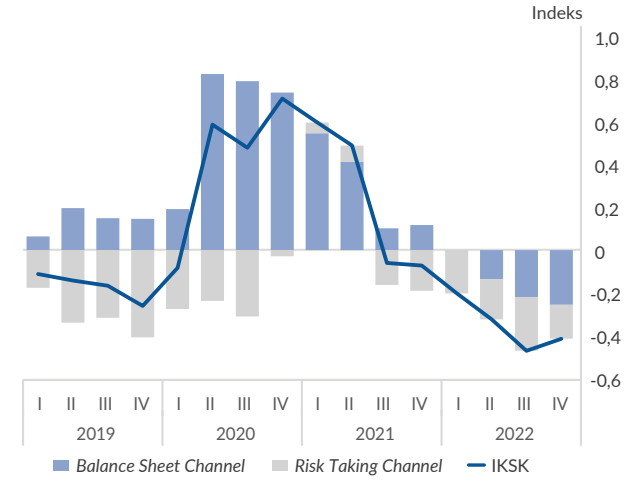

Sumber: Bank Indonesia

yang dapat timbul. Demikian pula, risiko kredit terhadap perbankan juga dapat meningkat karena kemungkinan perlambatan pertumbuhan ekonomi manakala restrukturisasi belum berakhir. Sehubungan dengan itu, penguatan koordinasi KSSK terus dilakukan dengan melakukan uji ketahanan (*stress-test*) pada sektor keuangan secara individu dan sistem terhadap berbagai risiko tersebut. Hasil *stress-test* tersebut menjadi dasar bagi perumusan respons kebijakan dan pengawasan yang diperlukan oleh masing-masing lembaga, baik Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS sesuai dengan kewenangan masing-masing. Selain itu, koordinasi surveilans sistemik dalam kerangka Forum Pengawasan Perbankan Terpadu antara Bank Indonesia dengan OJK dan LPS secara rutin terus dilakukan. Selain sinergi kebijakan makroprudensial-mikroprudensial, Bank Indonesia dan OJK terus memperkuat koordinasi dalam pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek dan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJP dan PLJPS) oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia dan LPS juga terus berkoordinasi untuk memperkuat kesiapan penanganan bank bermasalah atau resolusi bank oleh LPS jika pada waktunya diperlukan. Berbagai langkah penguatan koordinasi kebijakan dan pengawasan antarotoritas dalam KSSK tersebut menjadi dasar bagi penguatan ketentuan perundang-undangan lebih lanjut.

5.3

Arah Kebijakan Sistem Pembayaran

Kebijakan sistem pembayaran pada 2023 akan terus diarahkan untuk akselerasi digitalisasi pembayaran bagi integrasi lebih lanjut ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional, pengembangan Rupiah Digital, serta perluasan kerja sama sistem pembayaran antarnegara. Arah kebijakan sistem pembayaran tetap mendasarkan pada implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Kemajuan Ekonomi-Keuangan Digital (EKD) nasional selama ini memberikan peluang dan sekaligus tantangan untuk berkembang sangat cepat ke depan, dengan kejelasan visi, strategi, dan program konkret digitalisasi sistem pembayaran dalam BSPI 2025, didukung penuh oleh partisipasi aktif industri dalam digitalisasi jasa keuangan dan pembayaran ke konsumen serta akselerasi akseptasi masyarakat atas transaksi pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal (Gambar 5.5). Namun, sejumlah tantangan perlu kita sikapi dengan seksama, antara lain, baik karena kecepatan teknologi digital yang memerlukan biaya investasi tinggi, kelangkaan sumber daya manusia (SDM), dan risiko siber, maupun sangat cepatnya penetrasi pelaku digital keuangan global dan tuntutan kerja sama internasional. Dalam kaitan ini, kebijakan sistem pembayaran 2023 akan terus diarahkan pada akselerasi dan penguatan integrasi ekosistem EKD nasional, sesuai visi kesatu BSPI 2025, agar lebih kuat dan kompetitif dalam kerja sama internasional berdasarkan kepentingan nasional sesuai visi kelima BSPI 2025. Sebagai layaknya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, arah kebijakan dimaksud sebagai bentuk perwujudan "Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa" dalam integrasi ekosistem EKD nasional. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan 3 (tiga) sasaran, yaitu: (i) industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif; (ii) infrastruktur sistem pembayaran yang 3I (integrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas); serta (iii) praktik pasar yang sehat, efisien, dan wajar. Optimalitas ekosistem EKD nasional tersebut tetap mendasarkan pada akselerasi digitalisasi perbankan sesuai visi kedua, dalam jalinan kolaborasi dengan *fintech* dan *e-commerce* sesuai visi ketiga, serta mendorong inovasi yang seimbang dengan keamanan siber dan perlindungan konsumen sesuai visi keempat BSPI 2025. Dalam pelaksanaannya, keberagaman

Gambar 5.5. Arah Kebijakan Sistem Pembayaran 2023

Sumber: Bank Indonesia

dalam kapasitas pelaku, infrastruktur, layanan, dan instrumen pembayaran tetap diperhatikan dengan mengutamakan kepentingan nasional sesuai dengan asas "Bhinneka Tunggal Ika" dalam bingkai NKRI.

Kebijakan sistem pembayaran pada 2023 akan dilakukan melalui 5 (lima) strategi pokok yang saling memperkuat integrasi ekosistem EKD nasional. *Pertama*, penyusunan standar-standar nasional sebagai "Satu Bahasa" layanan sistem pembayaran secara kolaboratif antara Bank Indonesia dengan industri serta kampanye akseptasi dan penggunaannya oleh masyarakat konsumen. *Kedua*, akselerasi reformasi regulasi dan konsolidasi industri sistem pembayaran nasional sebagai "Satu Bangsa" secara *end-to-end* untuk membangun *unicorn-unicorn* Indonesia yang sehat, kompetitif, dan inovatif, baik secara nasional maupun internasional, serta ke depan siap menjadi "*wholesaler*" dalam penerbitan dan pengedaran Rupiah Digital. *Ketiga*, pengembangan lebih lanjut infrastruktur sistem pembayaran (ritel dan *wholesale*) yang 3I (Integrasi, Interkoneksi, Interoperabilitas) sebagai "Satu Nusa" untuk akselerasi integrasi ekosistem ekonomi-keuangan digital nasional dan ke depan sebagai salah satu prasyarat untuk penerbitan Rupiah Digital. *Keempat*, kebijakan harga dan praktik pasar industri sistem pembayaran nasional yang sehat, efisien, dan wajar untuk mendukung kepentingan nasional, konsumen, dan daya saing industri secara nasional dan global. *Kelima*, pengembangan lebih lanjut Rupiah Digital sebagai *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang sah di Indonesia melalui finalisasi *conceptual design*, pengembangan model bisnis termasuk persiapan peserta "*wholesaler*", serta pembangunan platform teknologi yang diperlukan untuk penerbitan dan pengedaran Rupiah Digital ke depan (Gambar 5.6).

***Pertama*, penyusunan standar-standar nasional layanan pembayaran digital sesuai praktik terbaik internasional secara kolaboratif antara Bank Indonesia dengan industri dan kampanye akseptasinya oleh masyarakat akan terus diperluas untuk akselerasi integrasi ekosistem EKD nasional.** Kesuksesan kolaborasi Bank Indonesia dengan industri dalam penyusunan dan penggunaan QRIS sebagai satu-satunya standar nasional QR di Indonesia akan terus diperluas, baik akseptasi masyarakat maupun jenis layanannya. Pada 2023, fitur layanan pembayaran QRIS akan diperluas dari QRIS *Merchant Presented Mode* (MPM), QRIS *Customer Presented Mode* (CPM), dan QRIS Tanpa Tatap Muka (TTM), ke QRIS Tarik Transfer Setor (TTS) dan perluasan QRIS antarnegara sesuai rencana. Target pengguna QRIS akan ditingkatkan dari

Gambar 5.6. Konfigurasi Ekosistem EKD Nasional ke Depan

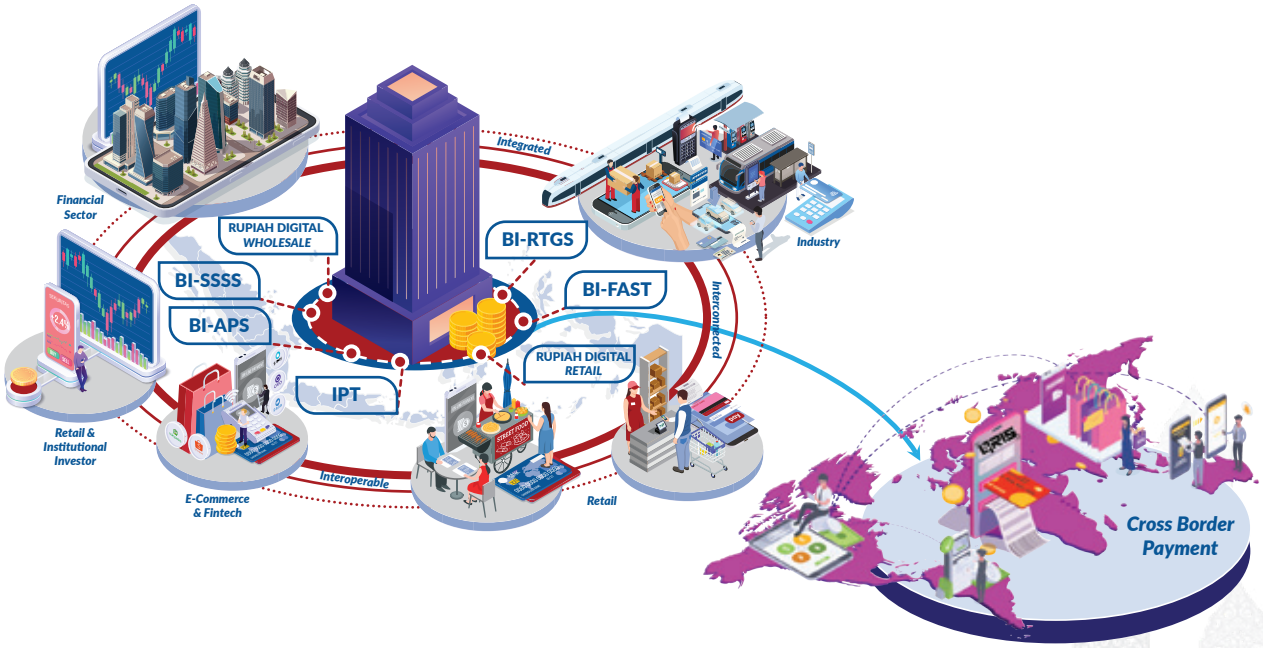

Sumber: Bank Indonesia

30 juta menjadi 45 juta. Setelah sukses bekerja sama dengan Thailand, kerja sama antarnegara penggunaan QR, *Fast Payments*, dan *Local Currency Transactions* (LCT) diperluas melalui dimulainya implementasi interoperabilitas dengan Malaysia, tahap uji coba dengan Singapura, dan tahap persiapan dengan Filipina. Perluasan kerja sama dengan negara ASEAN lain juga akan dijalin sebagai satu capaian Keketuaan Indonesia dalam ASEAN pada 2023, di samping dengan negara-negara lain seperti India dan Saudi Arabia. Implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) yang juga sukses pada 2022 akan terus diperluas pada 2023 dan tahun-tahun berikutnya. Jumlah peserta yang saat ini mencapai 15 penyelenggara dan jenis layanan pembayaran yang telah mencapai 324 jenis akan diperluas menjadi seluruh PJP dan 2194 jenis layanan sehingga makin menjadi "Satu Bahasa" dalam beragam layanan pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia juga akan berkolaborasi dengan industri dalam pengembangan pengelolaan data pembayaran nasional agar dapat mendukung ekosistem EKD nasional dengan tetap menghargai kerahasiaan dan privasi data. Pengembangan pengelolaan data tersebut dilakukan antara lain melalui pengembangan nomor identifikasi pembayaran (*Payment ID*), klasifikasi data ke dalam data publik, data kontraktual dan/atau dengan persetujuan pemilik (*customer consent*), dan data rahasia dan/atau pribadi, serta teknologi untuk pusat data yang diperlukan.

***Kedua*, Bank Indonesia akan terus mendorong konsolidasi industri sistem pembayaran nasional secara *end-to-end* untuk membentuk *unicorn-unicorn* Indonesia yang sehat, kompetitif, dan inovatif, baik secara nasional maupun internasional.** Seperti dikemukakan sebelumnya, penetrasi digital keuangan global ke berbagai negara, termasuk Indonesia, sangatlah cepat, seperti dapat dilihat pada sangat maraknya peredaran *crypto currency* dan penguasaan teknologi digital oleh BigTech. Tuntutan kerja sama pembayaran antarnegara juga meningkat sesuai kesepakatan "*cross-border payment roadmap*" negara-negara G20 sebagai salah satu capaian konkret Keketuaan Indonesia dalam G20 tahun 2022. Oleh karena itu, konsolidasi industri pembayaran nasional menjadi sangat penting agar Indonesia lebih mampu menghadapi penetrasi asing dan komitmen internasional tersebut. Hal ini yang menjadi pertimbangan Bank Indonesia untuk melakukan reformasi regulasi guna menata industri sistem pembayaran nasional ke dalam penunjukan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (6 PIP sistemik dan 3 PIP kritikal) dan pemberian izin kepada 3 jenis Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yaitu sistemik (10 PSPS), kritikal (20 PSPK), dan umum (350 PSPU), sesuai dengan kriteria *size*, *interconnectedness*, *complexity*, dan *substitutability* (Gambar 5.7). Dengan kriteria serupa, kepesertaan dalam BI-FAST juga dikelompokkan menjadi Peserta Langsung (21 PL) dan Peserta Tidak Langsung (56 PTL) dengan

Gambar 5.7. Klasifikasi Industri Sistem Pembayaran Nasional

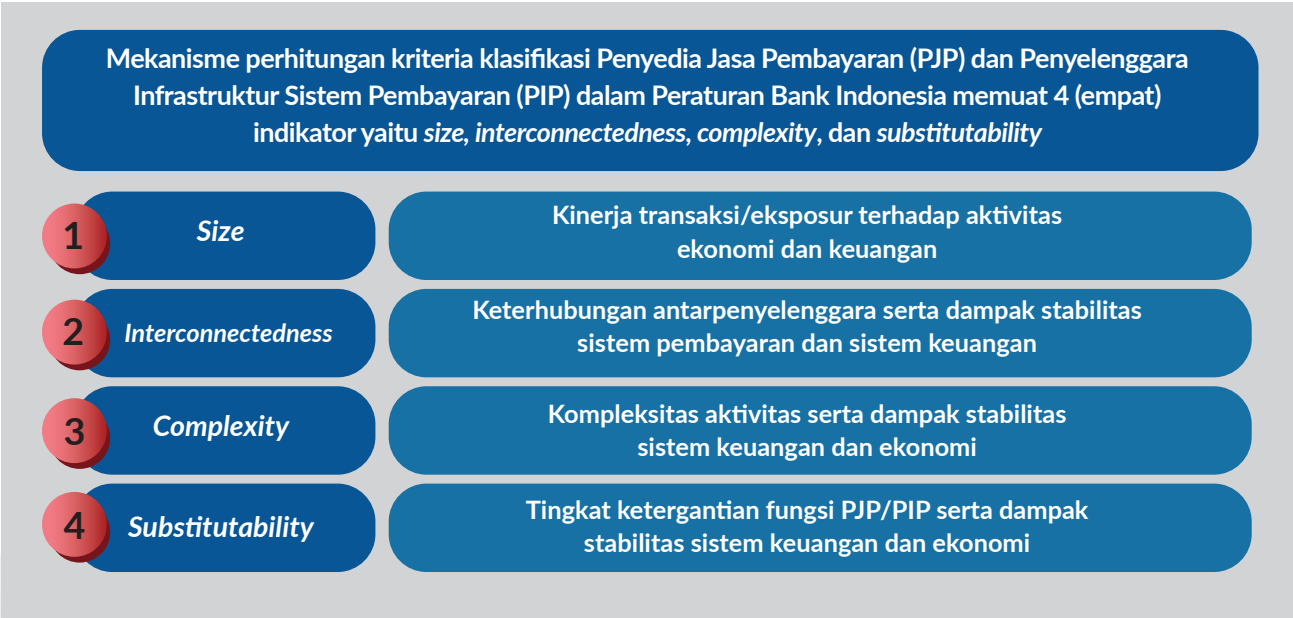

Sumber: Bank Indonesia

mempertimbangkan pula kemampuan dalam investasi teknologi yang diperlukan. Bank Indonesia juga mendorong kerja sama (bisnis dan/atau kepemilikan), baik antar-PJP maupun dengan perusahaan *e-commerce*, sehingga membentuk ekosistem EKD nasional secara *end-to-end*, yaitu digitalisasi layanan pembayaran digital dari perbankan, lembaga selain bank, *e-commerce* hingga ke masyarakat konsumen. Konsolidasi industri pembayaran secara terintegrasi dimaksud akan menjadi *unicorn-unicorn* Indonesia yang sehat, kompetitif, dan inovatif secara nasional maupun internasional. Lebih dari itu, penataan dan konsolidasi industri sistem pembayaran dimaksud juga sangat penting ke depan bagi Bank Indonesia untuk menentukan PJP mana yang memenuhi persyaratan untuk menjadi "*wholesaler*" dalam pengedaran Rupiah Digital.

***Ketiga*, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang 3I (integrasi, interkoneksi, interoperabilitas) akan terus dilanjutkan untuk akselerasi dan penguatan ekosistem EKD nasional.** Seperti layaknya jalan tol, perlu pengembangan infrastruktur jalan lingkar kota untuk akses kendaraan dari pusat kota ke berbagai penjuru tujuan, atau sebaliknya. Itulah perlunya 3I infrastruktur sistem pembayaran (SP) secara *end-to-end*, dari yang *wholesale* (BI-RTGS) untuk akses setelmen ke rekening di Bank Indonesia melalui infrastruktur ritel (BI-FAST, GPN, dan SKNBI) sampai ke kanal-kanal pembayaran yang dikembangkan industri sesuai model bisnis dan preferensi masyarakat (Gambar 5.8). Selain untuk kemudahan, kecepatan, dan keamanan layanan pembayaran dari dan ke masyarakat konsumen, 3I infrastuktur SP tersebut diperlukan untuk memperkuat "kesatuan dalam kebhinekaan" sistem pembayaran nasional guna mendukung kebangkitan perekonomian nasional di era digital ke depan. Pada 2023, pengembangan difokuskan pada 3I infrastruktur SP ritel (BI-FAST, SKNBI, GPN) dan infrastruktur SP nilai besar/*wholesale* (BI-RTGS). Tahap pertama pengembangan akan dilakukan pada 3I antara BI-FAST dan BI-RTGS yang kemudian dilanjutkan dengan 3I antara BI-FAST, BI-RTGS dengan GPN. Selain itu, kajian pengembangan *Interface* Pembayaran Terintegrasi (IPT) untuk interkoneksi antar kanal-kanal pembayaran di dalam industri akan dilanjutkan untuk diimplementasikan pada tahun berikutnya. Kemajuan dalam 3I antarinfrastruktur sistem pembayaran tersebut juga merupakan salah satu prasyarat untuk penerbitan Rupiah Digital ke depan.

Gambar 5.8. Arah Interkoneksi Infrastruktur Sistem Pembayaran ke Depan

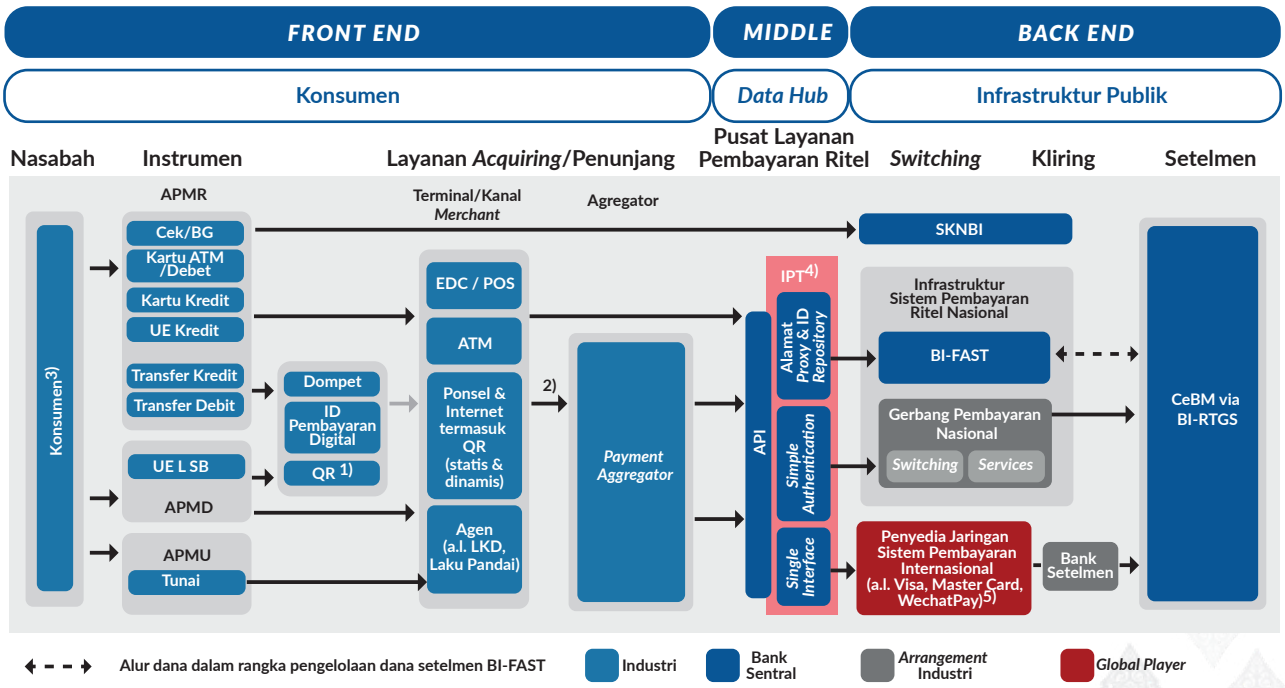

1) *Quick Response Indonesia Standard* (QRIS)
2) Pemrosesan transaksi kartu dan *mobile* melalui GPN, hingga IPT dan BI-FAST dapat melakukan pemrosesan transaksi *mobile*
3) Meliputi individu, korporasi, dan Pemerintah
4) *Interface* Pembayaran yang Terintegrasi
5) Data transaksi *cross border* akan dilewatkan *Interface* Pembayaran yang Terintegrasi sebelum ke penyedia jaringan sistem pembayaran internasional dalam rangka *data capturing*

Sumber: Bank Indonesia

***Keempat*, kebijakan harga dan praktik pasar akan terus dikembangkan untuk mewujudkan industri sistem pembayaran nasional yang sehat, efisien, dan wajar.** Di tengah layanan sistem pembayaran digital yang makin meluas dan kompleks, skema harga yang berlaku di industri saat ini terlalu bervariasi, baik antarjenis instrumen, layanan, maupun PJP. Bahkan, skema harga dimaksud tersebar ke berbagai infrastruktur dan instrumen. Kebijakan dan strategi harga yang diterapkan oleh PJP inkumben dengan pemain baru juga menimbulkan persaingan tidak sehat. Berbagai faktor ini menyebabkan layanan pembayaran di Indonesia tidak efisien, industri kurang kompetitif, dan menimbulkan beban kepada masyarakat. Karena itu, reformasi kebijakan harga sistem pembayaran di Indonesia perlu dilakukan untuk mendukung kepentingan nasional dan masyarakat konsumen, dengan tetap mendorong kontinuitas bisnis, daya saing, dan inovasi industri secara nasional dan global (Gambar 5.9). Untuk itu, kebijakan skema harga (*pricing policy*) akan ditempuh melalui 3 (tiga) pilar. Yang pertama, penetapan oleh Bank Indonesia (*regulator led policy*), yaitu bagi layanan pembayaran yang sistemik dengan infrastruktur yang disediakan Bank Indonesia, kepentingan nasional dan rakyat, termasuk program-program Pemerintah. Yang kedua, penetapan oleh Bank Indonesia bersama asosiasi industri (*collaborative regulator and industry policy*), yaitu pada layanan pembayaran antarindustri yang membutuhkan biaya investasi teknologi. Yang ketiga, penetapan oleh asosiasi industri sendiri (*industry led policy*), yaitu pada layanan pembayaran dari industri ke konsumen yang membutuhkan biaya inovasi dan pemasaran. Ketiga pilar kebijakan skema harga tersebut akan diterapkan sesuai dengan klaster layanan pembayaran sejenis untuk menyederhanakan, mengharmonisasikan, dan sekaligus menurunkan biaya transaksi dalam sistem pembayaran digital. Tentu saja skema harga tersebut akan tetap memberikan insentif yang menarik dan menguntungkan bagi industri untuk terus berinvestasi dan berinovasi, tanpa harus membebani masyarakat konsumen. Penguatan manajemen risiko dan pengawasan sistem pembayaran juga akan terus ditempuh, khususnya dalam implementasi keamanan dan ketahanan siber, serta penguatan kepatuhan terhadap prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Gambar 5.9. Arah Kebijakan Skema Harga Sistem Pembayaran ke Depan

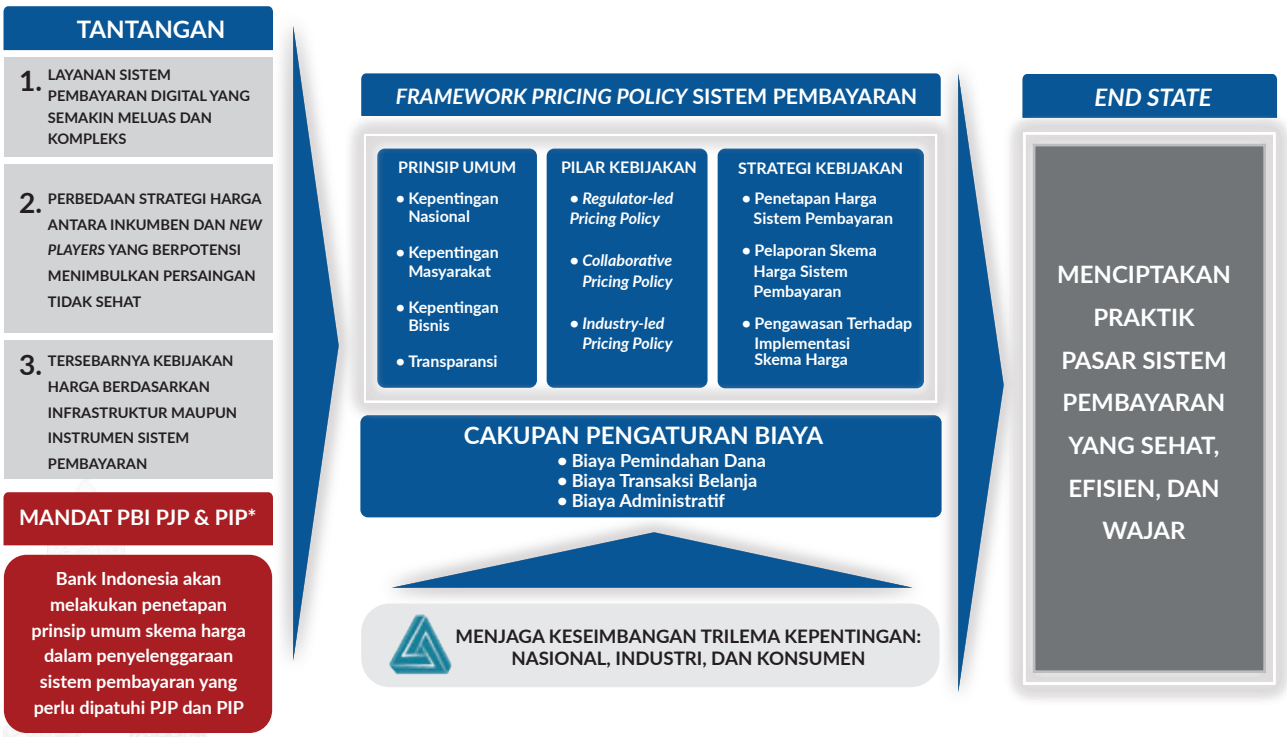

* Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP)

Sumber: Bank Indonesia

***Kelima*, Bank Indonesia akan melanjutkan pengembangan Rupiah Digital sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia untuk berbagai transaksi ekonomi dan keuangan digital.** Mempertimbangkan sejumlah kemajuan yang dicapai pada 2022 di Indonesia maupun di dunia internasional, termasuk melalui kerja sama dalam forum G20, IMF, dan BIS, pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia tanggal 30 November 2022 yang lalu, Bank Indonesia telah meluncurkan *white paper* Rupiah Digital yang dinamakan "Proyek Garuda". Proyek Garuda ini merupakan langkah menjaga kedaulatan mata uang Rupiah secara digital yang berisi dasar pemikiran dan peta jalan yang akan ditempuh untuk mendapatkan masukan dari industri dan masyarakat. Pengembangan Rupiah Digital akan mencakup 3 (tiga) aspek penting. *Pertama*, Bank Indonesia tengah membangun platform teknologi untuk "Khazanah Digital Rupiah (KDR)" untuk penerbitan Rupiah Digital, serta menetapkan sejumlah bank dan non-bank yang memenuhi persyaratan sebagai "*wholesaler*" untuk dapat mengedarkan Rupiah Digital bagi kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan ini, Bank Indonesia akan lebih fokus pada kewenangan sebagai bank sentral dalam penerbitan dan pengedaran Rupiah Digital, sementara pemanfaatannya secara "ritel" oleh masyarakat akan diserahkan kepada "*wholesaler*" tersebut (Gambar 5.10). *Kedua*, pembangunan infrastruktur sistem pembayaran dan pasar uang yang 3I (integrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas), khususnya pada dan di antara bank dan non-bank besar yang akan ditunjuk sebagai "*wholesaler*" Rupiah Digital. Hal ini penting agar para "*wholesaler*" membentuk jalinan *network* melalui teknologi DLT atau *blockchains* dengan Bank Indonesia dan di antara mereka sehingga mampu berperan dalam pengedaran secara "ritel" kepada masyarakat. *Ketiga*, pemilihan platform teknologi yang kompatibel dengan sejumlah platform yang kini sedang dikembangkan oleh bank-bank sentral dan lembaga internasional. Hal ini mengingat pada akhirnya Rupiah Digital tersebut harus mampu pula terkoneksi dengan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang diterbitkan oleh bank-bank sentral lain dengan mekanisme penentuan nilai tukar melalui teknologi digital. Dewasa ini sedang dikembangkan beberapa platform teknologi dalam kerja sama internasional, seperti proyek Dunbar oleh BISIH Singapore, MAS, BNM, RBA, dan SARB, serta proyek mBridge oleh BISIH Hong Kong, HKMA, BOT,

Gambar 5.10. Arah Pengembangan Rupiah Digital ke Depan

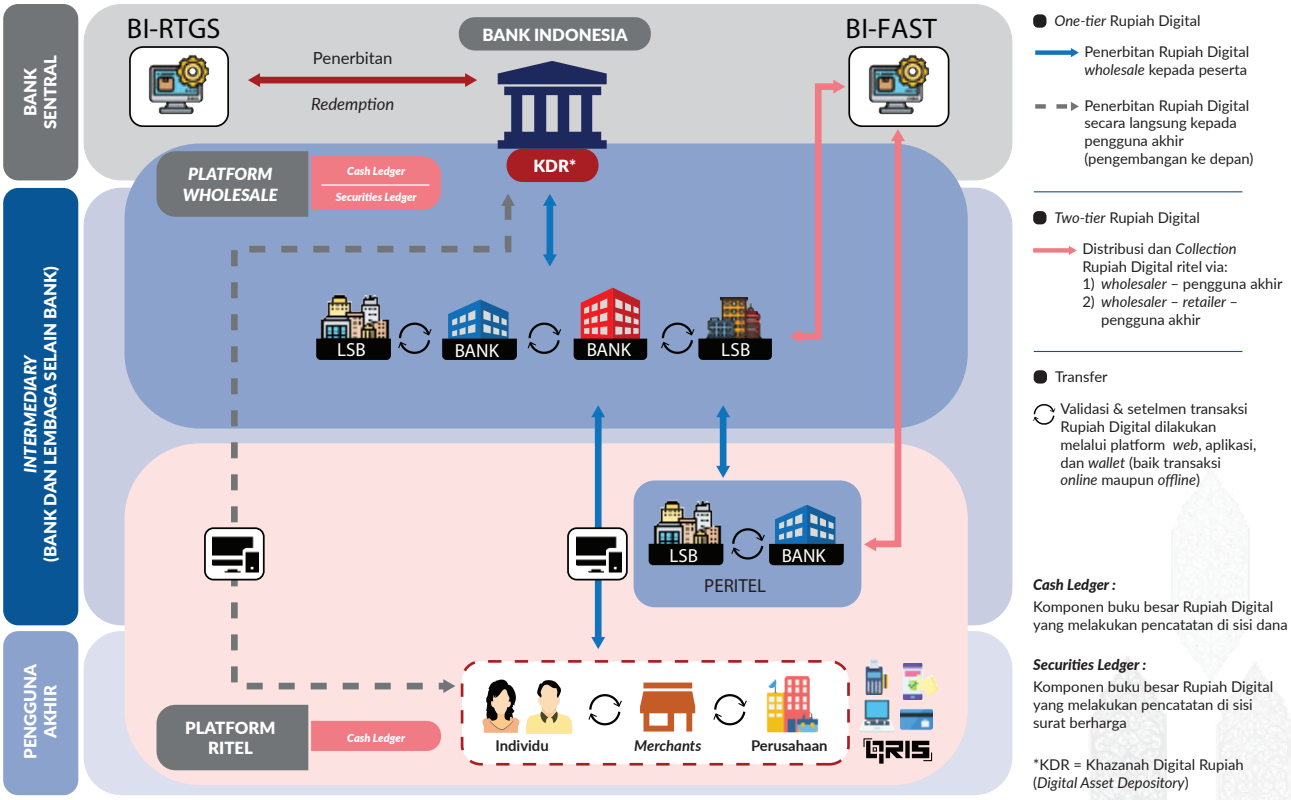

Sumber: Bank Indonesia

PBoC, dan CB-UAE. Pada akhirnya interkoneksi CBDC antarnegara memerlukan kesepakatan kebijakan dan pengaturan di antara bank sentral peserta, antara lain terkait mekanisme penentuan nilai tukar, pengelolaan aliran modal asing, hingga pengawasan baik terhadap transaksi maupun teknologi operasional, termasuk ketahanan terhadap serangan siber.

Proyek Garuda Rupiah Digital akan diimplementasikan secara bertahap. Pada tahap pertama akan dimulai dengan "*wholesale*-CBDC" untuk *use case* penerbitan, pemusnahan, dan transfer antarbank. Pada tahap kedua perluasan "*wholesale*-CBDC" dengan *use case* yang mendukung operasi moneter dan pengembangan pasar keuangan. Pada tahap ketiga akan dikembangkan interasi "*wholesale*-CBDC" dengan "ritel-CBDC" secara *end-to-end*. Pengembangan Rupiah Digital ini tentunya perlu didukung oleh sinergi dan kolaborasi yang kuat baik secara nasional maupun internasional.

Selain kelima strategi pokok tersebut, Bank Indonesia juga akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah), perbankan, dan asosiasi baik sistem pembayaran, *fintech* maupun *e-commerce*. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, terutama diarahkan untuk perluasan elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah dengan memperkuat TP2DD, mendorong penyaluran bansos *Government to Person* (G2P) 4.0, dan memperluas elektronifikasi dan integrasi antarmoda transportasi. Demikian pula, digitalisasi UMKM dan pariwisata akan makin digencarkan melalui Gernas BBI dan BWI di berbagai daerah dan destinasi pariwisata utama yang telah ditetapkan Pemerintah. Sinergi dan koordinasi pengaturan dan pengawasan terhadap digitalisasi sistem pembayaran oleh Bank Indonesia dengan digitalisasi lembaga keuangan oleh OJK akan makin dipererat, termasuk terhadap transaksi *crypto assets*, pengembangan *sandbox*, Industri Teknologi Sistem Keuangan (ITSK), literasi keuangan digital dan perlindungan konsumen, serta keamanan siber. Sinergi dengan perbankan, asosiasi sistem pembayaran, asosiasi *fintech*, dan asosiasi lainnya terus diperkuat baik dalam memperluas berbagai program digitalisasi sistem pembayaran yang sudah berjalan, seperti QRIS, SNAP, dan BI-FAST, maupun dalam memperluas layanan kepada masyarakat luas. Hal ini telah menjadi prinsip Bank Indonesia bahwa kebijakan, pengaturan, dan pengawasan sistem pembayaran dirumuskan dan dilaksanakan bersama industri (*industry friendly policy*).

Bank Indonesia juga akan terus memperkuat kebijakan pengelolaan uang Rupiah untuk menyediakan uang layak edar dengan denominasi yang sesuai dan tepat waktu di seluruh wilayah NKRI. Upaya ke depan di antaranya melalui penguatan strategi operasional layanan kas yang lebih efisien dengan memperhatikan kedekatan geografis, evaluasi terhadap jalur dan moda transportasi distribusi uang, evaluasi kecukupan jaringan akses terhadap uang kartal (*access to cash*), serta penyediaan uang kartal dalam jumlah dan kualitas yang memadai di seluruh wilayah termasuk *blankspots* dan 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil). Dari sisi digitalisasi, penguatan dilakukan melalui *enhancement* terhadap *decision support system* dan *executive information system* untuk mendukung pemantauan, *early warning*, dan pengambilan strategi kebijakan PUR yang lebih Lengkap, Akurat, Kini, dan Utuh. Upaya peningkatan pemahaman dalam merawat uang Rupiah juga akan terus dilakukan melalui perluasan gerakan Cinta, Bangga dan Paham (CBP) Rupiah melalui berbagai komunitas masyarakat serta media massa (*above the line*). Selain itu, komunikasi dengan industri juga akan terus dilakukan melalui Forum Industri Pengelolaan Uang Rupiah (FORIN PUR) bersama Perbankan dan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR).

5.4

Arah Kebijakan Pengembangan Pasar Uang

Kebijakan pengembangan pasar uang pada 2023 akan terus diarahkan untuk memperkuat efektivitas operasi dan transmisi kebijakan moneter yang makin terintegrasi dengan terwujudnya pasar uang yang modern dan efisien, serta mampu mendukung pembiayaan bagi perekonomian nasional. Arah pengembangan pasar uang dimaksud tetap konsisten dengan tujuan dan program dalam BPPU 2025, yaitu untuk membangun pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta mendukung transformasi pengelolaan moneter yang terintegrasi dengan pasar uang (Gambar 5.11). Pada 2023, fokus pengembangan tetap diarahkan pada 3 (tiga) aspek pasar uang yang efisien (3P), yaitu instrumen (*product*), pelaku (*participant*), dan mekanisme harga (*pricing*), dengan infrastruktur yang 3I (integrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas) antara pasar uang dan sistem pembayaran. Pengembangan akan lebih dititikberatkan pada aspek 3I antara infrastruktur, pelaku, dan instrumen dalam mendukung terintegrasinya operasi moneter Bank Indonesia dengan pendalaman pasar uang. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pengembangan pasar uang pada 2023 akan difokuskan pada 4 (empat) program utama. *Pertama*, pengembangan infrastruktur operasi moneter Bank Indonesia yang 3I dengan infrastruktur pasar uang sehingga dapat makin memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter dan mempercepat modernisasi pasar uang Indonesia. *Kedua*, konsolidasi peserta operasi moneter dengan pelaku pasar uang dengan klasifikasi *Primary Dealers* (PDs) sistemik, kritikal, dan umum, konsisten dengan kriteria lembaga keuangan yang penting secara sistemik (*systemically important financial institutions*, SIFIs), sehingga sejalan dengan klasifikasi industri sistem pembayaran (SIPS). *Ketiga*, pengembangan instrumen pasar uang yang mendukung terjaganya stabilitas pasar uang (Rupiah dan valuta asing) dan pasar obligasi, khususnya instrumen derivatif seperti DNDF, repo, maupun *swap* nilai tukar dan suku bunga, tanpa mengurangi pengembangan instrumen untuk pembiayaan. *Keempat*, penguatan mekanisme pasar yang efisien dalam pembentukan struktur suku bunga (IndONIA dan repo), nilai tukar (DNDF), dan *hedging* (*swap* suku bunga dan nilai tukar) sehingga memperkuat transmisi kebijakan moneter dan stabilitas pasar keuangan.

Gambar 5.11. Arah Kebijakan Pengembangan Pasar Uang 2023

Sumber: Bank Indonesia

Pengembangan infrastruktur operasi moneter Bank Indonesia yang 3I (integrasi, interkoneksi, interoperabilitas) dengan infrastruktur pasar uang akan dapat makin memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter dan mempercepat modernisasi pasar uang Indonesia. Secara internal Bank Indonesia akan melanjutkan finalisasi *Conceptual Design* (CD) pengembangan infrastruktur pasar uang yang 3I dengan sistem pembayaran, termasuk BI-APS, BI-SSSS, BI-RTGS Gen-3, dan *Trade Repository* (Gambar 5.12). Bank Indonesia akan lebih memprioritaskan pengembangan infrastruktur untuk modernisasi operasi moneter, BI-APS, yang akan diikuti dengan infrastruktur lain, khususnya modernisasi BI-SSSS untuk lebih memudahkan pemanfaatan SBN sebagai *underlying transactions* repo maupun produk derivatif pasar uang lain. Terkait infrastruktur di pasar uang, Bank Indonesia akan melanjutkan kolaborasi dengan industri dalam pengembangan *Central Counter-party* (CCP) untuk pasar derivatif SBNT (suku bunga dan nilai tukar) secara *netting* (CCP SBNT), di samping perluasan transaksi pasar uang melalui ETP *Multimatching* baik untuk pasar uang Rupiah maupun valas. Perlunya infrastruktur operasi moneter, BI-APS, terintegrasi, terinterkoneksi dan memiliki interoperabilitas (3I) dengan infrastruktur pasar uang, CCP SBNT dan ETP *Multimatching* didasarkan oleh 3 (tiga) pertimbangan. *Pertama*, adanya integrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas antarinfrastruktur memungkinkan Bank Indonesia menjadi salah satu peserta dalam transaksi pasar uang, tanpa mengurangi kemampuan Bank Indonesia dalam melakukan operasi moneter secara langsung seperti selama ini. Partisipasi Bank Indonesia di pasar jelas akan makin meningkatkan transaksi dan kedalaman pasar uang di Indonesia. *Kedua*, efektivitas transmisi kebijakan suku bunga moneter di pasar uang dan pasar obligasi Pemerintah akan makin kuat dengan partisipasi Bank Indonesia dan makin besarnya transaksi di pasar uang. Di samping itu, kredibilitas pembentukan struktur suku bunga yang terjadi dari transaksi tersebut dan efisiensi pasar uang juga akan meningkat. *Ketiga*, infrastruktur operasi moneter dan pasar uang yang 3I tersebut juga akan menjadi salah satu prasyarat untuk penerbitan dan pengedaran Rupiah Digital. Dengan dukungan infrastruktur yang 3I, operasi moneter dan transaksi di pasar uang akan dapat dilakukan baik dengan mekanisme pemindahan antarrekening bank seperti selama ini maupun secara serta merta melalui Rupiah Digital.

Konsolidasi peserta operasi moneter dan pelaku pasar uang akan ditempuh dengan pengelompokan sesuai dengan besarnya peran dan pentingnya lembaga keuangan secara sistemik (SIFIs). Hingga saat ini, peserta operasi moneter dan pasar uang masih sangat heterogen, baik dari sisi besarnya transaksi, kapabilitas lembaga, maupun manajemen

Gambar 5.12. Arah Pengembangan 3I Infrastruktur Pasar Uang Operasi Moneter dan Sistem Pembayaran ke Depan

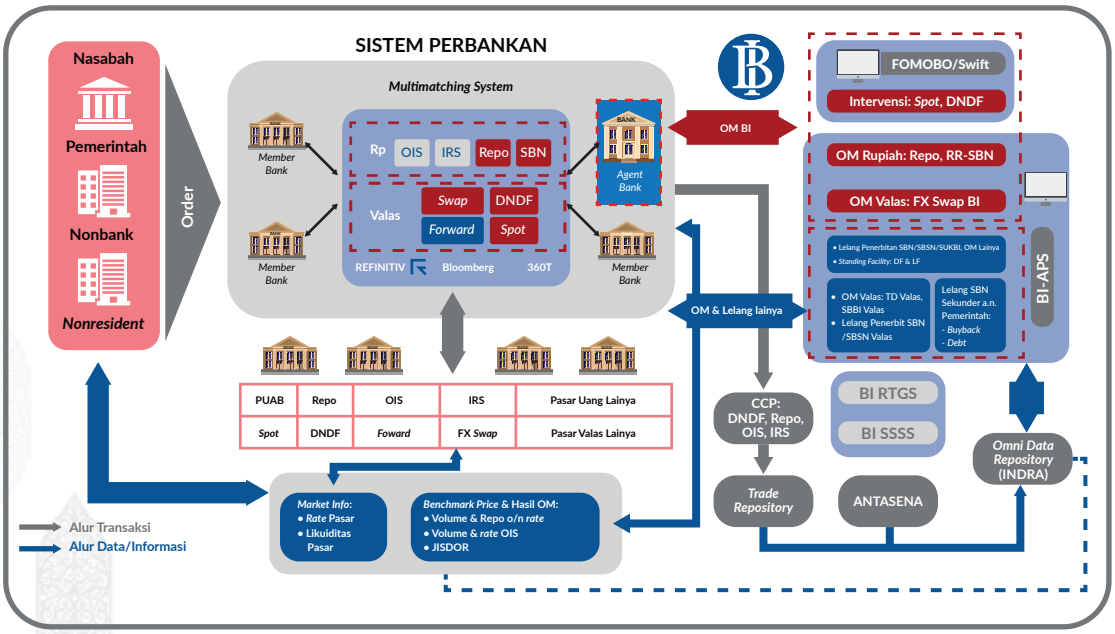

Sumber: Bank Indonesia

risikonya. Kondisi ini menyebabkan segmentasi pasar uang yang mengakibatkan kurang berkembangnya transaksi dan tidak efisiennya mekanisme pasar karena besarnya risiko, baik risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, maupun risiko operasional dari para peserta. Pengelompokan peserta operasi moneter dan pasar uang menjadi sistemik, kritikal, dan umum didasarkan pada 4 (empat) kriteria pokok sesuai dengan BIS, yaitu: *Size*, *Interconnectedness*, *Complexity*, dan *Substitutability*. sehingga akan lebih konsisten dengan standar internasional sebagaimana dalam penetapan bank sistemik. Pendekatan ini telah diterapkan Bank Indonesia dalam penetapan PJP ke dalam PJP sistemik, kritikal, dan umum serta penetapan peserta langsung dan tidak langsung dalam BI-FAST. Pendekatan dengan 4 (empat) kriteria pokok tersebut juga akan diterapkan dalam pengelompokan *Primary Dealers* (PDs) sebagai peserta operasi moneter dan pelaku pasar uang. Dengan demikian, ke depan akan terjadi konvergensi pengelompokan lembaga keuangan sebagai bank sistemik maupun sebagai peserta dalam operasi moneter, sistem pembayaran, dan pasar uang, yaitu ke dalam sistemik, kritikal, dan umum. Konvergensi peserta ini sangat penting tidak saja dalam mempercepat konsolidasi pelaku pasar uang dan sistem pembayaran, tetapi juga bagi Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan dengan pendekatan dan kriteria yang sesuai standar internasional. Lebih dari itu, pengelompokan tersebut juga sangat penting bagi Bank Indonesia ke depan dalam menetapkan peserta yang memenuhi persyaratan menjadi "*wholesaler*" dalam penerbitan dan pengedaran Rupiah Digital.

Pengembangan instrumen pasar uang ditempuh untuk mendukung terjaganya stabilitas pasar uang (Rupiah dan valuta asing) dan pasar obligasi, tanpa mengurangi pengembangan instrumen untuk pembiayaan. Dewasa ini kurang berkembangnya pasar uang jangka pendek menjadi penyebab tingginya risiko likuiditas, risiko pasar (nilai tukar dan suku bunga), serta risiko kredit di pasar keuangan Indonesia. Instrumen derivatif di pasar valas, seperti DNDF dan *swap* sebagai instrumen *hedging* nilai tukar, meskipun telah makin berkembang namun volume transaksinya masih terbatas dan sebagian besar terkait dengan operasi moneter Bank Indonesia dengan tenor terbatas hingga 3 bulan. Volume *swap* sebagai instrumen lindung nilai suku bunga juga belum berkembang. Volume transaksi repo dengan *underlying* SBN di pasar uang juga masih terbatas, demikian pula dengan instrumen sekuritas jangka pendek seperti Surat Berharga Komersial (SBK). Oleh karena itu, Bank Indonesia akan lebih fokus pada pengembangan instrumen dan peningkatan volume transaksi pasar uang tersebut agar lebih efisien untuk mendorong investasi (portofolio dan PMA), serta sekaligus memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Sementara itu, pengembangan instrumen pembiayaan ekonomi juga akan terus diperkuat melalui 3 (tiga) strategi kebijakan yaitu: (i) mendorong pengembangan sekuritisasi aset melalui program KIK-EBA dan EBA-SP, (ii) mendorong pengembangan investor ritel dan literasi keuangan, dan (iii) memperkuat koordinasi dan komunikasi terkait program *Sustainable Green Finance* (SGF). Berbagai kebijakan pendalaman pasar keuangan tersebut akan didukung oleh sinergi yang erat antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan OJK dalam koordinasi FK-PPPK.

Berbagai program peningkatan penggunaan kerangka *Local Currency Transactions* (LCT) dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi dengan negara mitra, terus diakselerasi melalui penguatan sinergi dan koordinasi dengan otoritas terkait lainnya. Bank Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk memperluas kampanye penggunaan LCT berbasis *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD) kepada perbankan, korporasi, dan pihak pengguna potensial lainnya bekerja sama dengan instansi terkait di domestik dan negara mitra. Perluasan penggunaan LCT tersebut juga didukung oleh implementasi kurs acuan Non-USD/IDR untuk pengembangan instrumen derivatif dalam kerangka LCT. Selain itu, Bank Indonesia juga akan memperkuat pengaturan transaksi di pasar valuta asing melalui penyederhanaan dan integrasi ketentuan untuk mendorong pendalaman pasar dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Reformasi regulasi pasar uang ini akan menyederhanakan ketentuan dengan mendasarkan pada pendekatan *principle-based* untuk meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas implementasi bagi pelaku pasar.

5.5

Arah Kebijakan Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau

Bank Indonesia akan terus memperluas dan memperkuat program pengembangan UMKM sebagai kebanggaan Indonesia, "*Go Export*", dan "*Go Digital*". Pengembangan UMKM Bank Indonesia lebih ditekankan pada nilai tambah untuk mendukung pengendalian inflasi dan peningkatan devisa melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi akses pembiayaan guna meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong UMKM naik kelas. *Pertama*, korporatisasi ditempuh melalui penguatan kelembagaan, perluasan kemitraan, serta penciptaan wirausaha baru. Fasilitasi yang dilakukan di antaranya melalui peningkatan tahapan pengembangan kelompok *subsistence*. *Kedua*, peningkatan kapasitas UMKM dilakukan secara *end-to-end* didukung dengan digitalisasi untuk mendorong peningkatan produksi, pengelolaan keuangan, dan perluasan akses pasar. Fasilitasi yang dilakukan mencakup perluasan akses pasar, penguatan klaster pangan hulu hilir dalam rangka peningkatan produktivitas dan/atau nilai tambah, dan peningkatan kapasitas dalam rangka pengembangan UMKM Hijau. Peningkatan akses pasar dilakukan melalui fasilitasi pengembangan *hub* ekspor, sertifikasi dan kurasi produk, promosi perdagangan internasional, serta mendorong interkoneksi dengan *local value chain* (LVC) maupun *global value chain* (GVC). Dalam kaitan ini, sinergi dengan Pemerintah dilakukan, antara lain, melalui penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia (KKI) guna mendorong UMKM "*Go Export*" dan "*Go Digital*". KKI menjadi salah satu bentuk sinergi sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Gernas BBI dan BWI karena turut melibatkan seluruh kantor Bank Indonesia di berbagai daerah. Selain itu, sinergi juga dilakukan melalui GNPIP untuk meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan produksi UMKM pangan. *Ketiga*, fasilitasi akses pembiayaan UMKM akan terus didorong untuk mendukung pemenuhan ketentuan pembiayaan inklusif (RPIM) serta meningkatkan fasilitasi *business matching* pembiayaan UMKM. Sementara itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan UMKM, menyusun pemetaan pola pembiayaan UMKM dengan *multiple channel e-commerce* dan kemitraan, dan memperluas implementasi digitalisasi melalui SIAPIK. Di tengah tren digitalisasi, pengembangan UMKM diperkuat dengan penguatan digitalisasi, salah satunya melalui penerapan *deliverable* terkait keuangan inklusif pada Presidensi G20 Indonesia 2022, yaitu pedoman implementasi untuk meningkatkan inklusi keuangan digital. Memperkuat komitmen pengembangan UMKM tersebut, peningkatan inklusi keuangan digital dan literasi keuangan digital menjadi salah satu topik yang akan diangkat dalam agenda Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Sementara itu, di tengah tren hijau, Bank Indonesia juga akan mendorong pengembangan UMKM Hijau

melalui penyusunan *pilot project* sebagai upaya penyempurnaan kajian UMKM Hijau Bank Indonesia yang telah disusun untuk memperoleh model bisnis yang *applicable*.

Bank Indonesia juga terus mendukung peningkatan peran ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi. Akselerasi implementasi ekosistem *halal value chain*, baik lokal maupun global, makin diperluas baik dari aspek pelaku, kelembagaan, maupun infrastruktur pendukung. Pengembangan ekosistem *halal value chain* ini akan tetap diutamakan pada sektor unggulan makanan halal (*halal food*) dan fesyen muslim (*modest fashion*). Dari sisi keuangan syariah, kebijakan pendalaman pasar uang syariah guna mendukung pembiayaan syariah ditempuh antara lain melalui pengembangan instrumen transaksi valas dan Sukuk BI inklusif. Dukungan peningkatan optimalisasi keuangan sosial syariah, sebagai alternatif sumber pembiayaan sektor unggulan ekonomi syariah tersebut, terus didorong, terutama melalui wakaf produktif. Di samping itu, peningkatan *business linkage* dalam rangkaian kegiatan Fesyar di 3 (tiga) wilayah (Jawa, Sumatera, Wilayah Indonesia Timur) dan ISEF bertaraf internasional juga terus ditempuh. Penguatan *center of excellence* ekonomi dan keuangan syariah juga terus ditingkatkan, melalui pendidikan tinggi, sebagai bagian penting dalam implementasi strategi pengembangan dan peningkatan literasi masyarakat. Untuk itu, Bank Indonesia senantiasa memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik di dalam wadah Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) maupun dengan pondok pesantren, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), asosiasi pengusaha, perbankan, serta para ulama, akademisi, dan masyarakat luas.

Sinergi kebijakan dengan Pemerintah terus diperkuat untuk mendukung pencapaian ekonomi berkelanjutan dengan sistem keuangan yang stabil, inklusif, dan hijau. Untuk menjawab tantangan perubahan iklim ke depan yang dapat mengancam stabilitas perekonomian serta sebagai bentuk kontribusi aktif Bank Indonesia dalam pencapaian target Indonesia rendah karbon, Bank Indonesia akan melakukan transformasi yang bersifat menyeluruh melalui penguatan kebijakan keuangan hijau. Kajian mengenai kebijakan makroprudensial hijau untuk mendukung *sustainable finance* terus dilakukan. Bank Indonesia juga terus mendorong pendalaman pasar keuangan melalui pengembangan instrumen pasar uang hijau. Pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif hijau terus dilakukan, antara lain, melalui pengembangan model bisnis ekonomi sirkular, *green farming*, dan laporan keuangan hijau bagi UMKM dan pelaku ekonomi syariah. Selain itu, Bank Indonesia terus melanjutkan transformasi kelembagaan Bank Indonesia, termasuk terkait tata kelola, manajemen risiko, strategi, serta *performance indicator* hijau. Dalam pengembangan dan implementasinya, Bank Indonesia akan terus bersinergi dan melakukan koordinasi yang erat dengan KSSK, Kementerian/ Lembaga dan *stakeholders* terkait.

5.6

Arah Kebijakan Internasional

Di sisi kebijakan internasional, setelah kesuksesan Keketuaan Indonesia pada G20 pada 2022, Bank Indonesia akan mendukung penuh keberhasilan Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023, bersinergi erat dengan Pemerintah khususnya pada jalur integrasi keuangan. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan mendukung kelanjutan dari 6 (enam) agenda prioritas jalur keuangan dalam Keketuaan Indonesia dalam G20 Tahun 2022 dengan tema G20 "*Recover Together, Recover Stronger*" ke dalam agenda prioritas Integrasi Keuangan ASEAN dalam Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 dengan tema "*Recovery-Rebuilding, Digital Economy, Sustainability*". Untuk pilar pertama "*Recovery-Rebuilding*", agenda prioritas G20 "*Addressing Exit Policy Spillovers and Scarring Effects*" akan dijadikan agenda dalam Keketuaan ASEAN 2023 dengan *High Level Policy Dialogue* dan *Technical Level Discussion* dalam *Exit Policies Spillovers, Scarring Effects, and Macroeconomic Policy Mix* (IMF-*Integrated Policy Framework* dan BIS-*Macro-financial Stability Framework*). Selain itu, peningkatan kerja sama ASEAN dalam penerapan *Local Currency Transactions (LCT) Framework* dilakukan antara lain melalui penguatan dukungan otoritas/insentif, relaksasi aturan, infrastruktur pasar keuangan, dan keterkaitan LCT dengan *cross border payment*. Untuk pilar kedua "*Digital Economy*", Bank Indonesia akan mengangkat agenda G20 "*Advancing Payment Connectivity and Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy*" di ASEAN. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan fokus pada *Advancing ASEAN Payment Connectivity* dengan kerja sama *Cross Border Payments Linkage*, yaitu konektivitas QR dan *fast payment* dengan LCT yang diresmikan Bapak Presiden pada G20 *Leaders* di Bali tanggal 14 November 2022 yang lalu (Gambar 5.13). Selain itu, akan dilakukan *High Policy Discussion* dalam mendukung *CBDC Initiatives, Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy* untuk penguatan *Digital Financial Literacy* di ASEAN, termasuk penyelenggaraan *Digital Financial Inclusion Festival*,

Gambar 5.13. Arah Konektivitas Sistem Pembayaran ASEAN

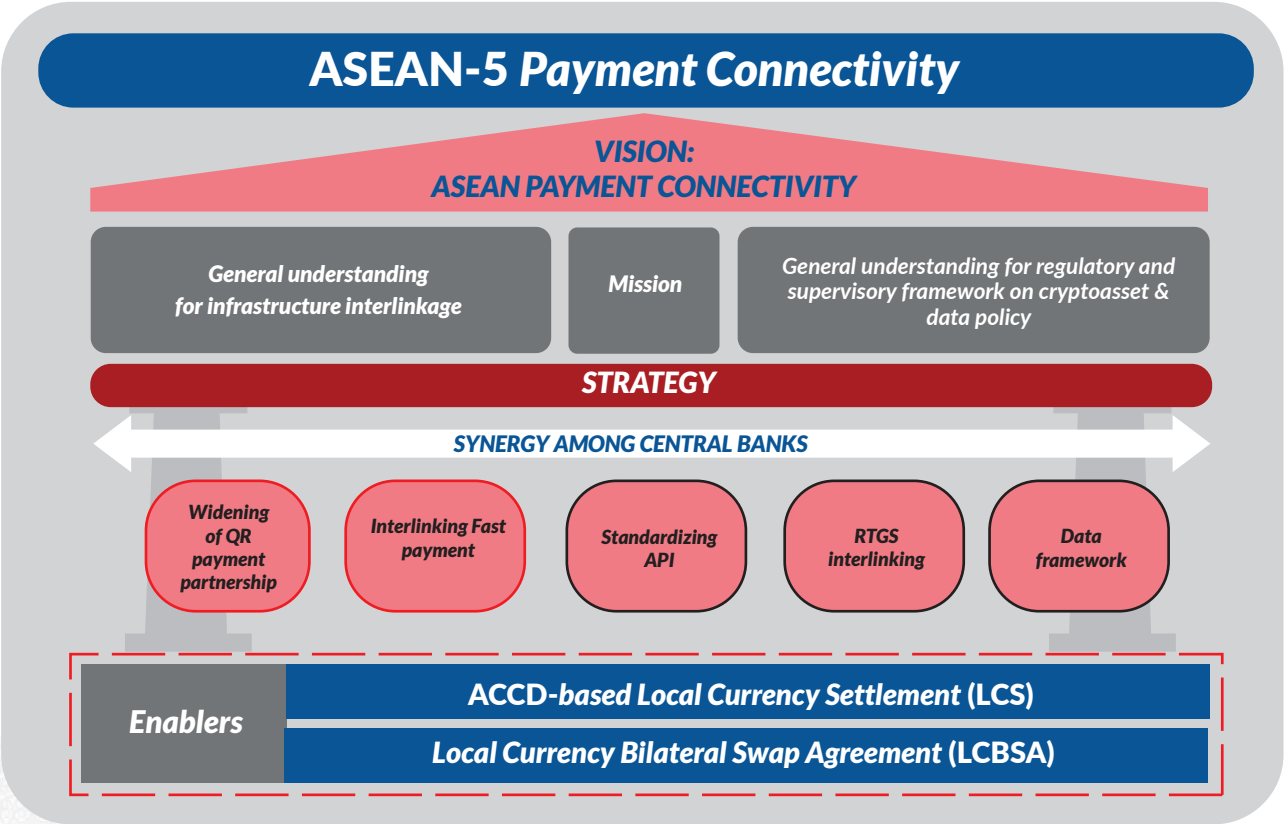

Sumber: Bank Indonesia

High Level Discussion on Regulatory and Supervisory on Cryptoassets and Cybersecurity, serta implikasinya bagi *WC-ABIF Guideline to Incorporate Digitalization*. *Policy Discussion and Seminar addressing Climate Related Risk* juga diagendakan.

Bank Indonesia juga akan terus aktif dalam berbagai forum kerja sama internasional untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Penguatan kerja sama internasional juga terus dilakukan pada tataran multilateral, regional, dan bilateral terkait Jaring Pengaman Keuangan Internasional, LCT, Sistem Pembayaran dan Inovasi Keuangan Digital, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), hingga *Structured Bilateral Cooperation* dengan bank sentral dan lembaga internasional lainnya. Bank Indonesia terus meningkatkan persepsi positif investor dan lembaga *rating* melalui kegiatan *engagement* yang lebih proaktif. Fasilitasi promosi perdagangan dan investasi sektor-sektor prioritas melalui dukungan *Investor Relation Unit* (IRU), baik di tataran daerah, nasional, maupun internasional, juga akan terus ditingkatkan. Di samping itu, kampanye yang masif untuk mendorong dan memperluas penggunaan LCT, di antaranya melalui kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha potensial bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Luar Negeri dan Dalam Negeri serta mitra strategis Bank Indonesia lainnya, juga akan terus diperkuat.

5.7

Arah Kebijakan Transformasi Bank Indonesia

Bank Indonesia akan terus melanjutkan reformasi kelembagaan secara menyeluruh untuk membangun lembaga bank sentral yang kredibel, berkinerja unggul, bertata kelola, dan transparan. Transformasi kebijakan, organisasi, SDM, dan digital yang telah ditempuh sejak 2018 makin diperkuat dan dipertajam untuk mewujudkan visi "Bank Sentral Digital Terdepan yang Berkontribusi Nyata bagi Perekonomian Nasional dan Terbaik di antara *Emerging Markets* menuju Indonesia Maju". Untuk menyempurnakan respons bauran kebijakan dalam memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan ekonomi dari dampak gejolak global, transformasi kebijakan akan difokuskan pada penguatan kerangka kerja bauran kebijakan (*Bank Indonesia policy mix*), pemodelan makroekonomi dan sistem keuangan, serta respons bauran kebijakan yang optimal. Penguatan transformasi kebijakan moneter ditekankan pada perumusan optimalitas respons kebijakan suku bunga, stabilisasi nilai tukar dan *twist operation*, integrasi pengelolaan moneter dengan pendalaman pasar uang sesuai BPPU 2025, serta optimalitas kecukupan dan pengelolaan cadangan devisa. Transformasi kebijakan makroprudensial akan ditekankan pada penguatan permodelan keterkaitan makro-sistem keuangan (*macro-financial linkage*), integrasi respons kebijakan makroprudensial dengan surveilans sistemik, pengembangan instrumen kebijakan makroprudensial untuk kredit/pembiayaan perbankan bagi dunia usaha, serta kesiapan PLJP/PLJPS dalam hal diperlukan. Sementara itu, transformasi kebijakan sistem pembayaran akan difokuskan pada kelanjutan program digitalisasi sistem pembayaran sesuai BSPI 2025 dan pengembangan lebih lanjut Rupiah Digital.

Transformasi organisasi diarahkan pada penguatan implementasi kerangka kerja lembaga berkinerja unggul dan penguatan digitalisasi proses kerja kebijakan dan kelembagaan. Penerapan asesmen dan perumusan respons kebijakan kelembagaan berbasis Efektif, Efisien, dan bertata kelola/*Govern* (2EG) yang telah berjalan selama ini melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Kelembagaan secara triwulanan akan diperkuat dengan metodologi pengukuran efektivitas korelasi indikator kinerja dan proses kerja, efisiensi pos-pos anggaran penting dengan pencapaian indikator kinerja, penguatan pengukuran risiko strategis ke depan dan mitigasinya, serta audit internal. Penguatan proses kerja, manajemen risiko, dan tata kelola pengelolaan *major projects* terus dilakukan baik untuk proyek sistem informasi maupun proyek fisik. Sementara itu, implementasi *Digital Business Process Re-enginering* (Digital BPR) dalam perumusan bauran kebijakan yang telah berhasil dari tingkat departemen ke RDG akan diperluas dengan Digital BPR di dalam departemen dengan menciptakan "*digital collaborative work*", yang akan dimulai dari departemen-departemen perumusan kebijakan, manajemen strategis, dan sumber daya manusia (Gambar 5.14). Dengan Digital BPR, proses kerja yang semula memerlukan 8 (delapan) tahap akan diperpendek menjadi 4 (empat) tahap dari unit kerja di tingkat departemen hingga pengambilan keputusan di RDG. Pola kerja *hybrid* juga dipertahankan karena lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan sumber daya dan pencapaian kinerja.

Transformasi digital untuk proses kerja kebijakan maupun kelembagaan diakselerasi berdasarkan Rencana Induk Inovasi Digital Bank Indonesia (RIVIBI) menuju visi sebagai bank sentral terdepan. Digitalisasi Bank Indonesia mencakup 3 (tiga) bagian penting yang saling terkait dan memperkuat (Gambar 5.15). *Pertama*, digitalisasi proses kerja, baik kebijakan maupun kelembagaan, seperti diuraikan di atas. Digitalisasi proses kerja memungkinkan kolaborasi kerja dapat lebih cepat, efektif, dan efisien, serta memungkinkan bekerja secara virtual dari rumah atau tempat yang berbeda-beda. *Kedua*, digitalisasi data agar memungkinkan pengguna dapat bereksperimen dan berinovasi sendiri (*customer experience*) pemanfaatannya secara instan, interaktif, dan multidimensi untuk analisis dan perumusan kebijakan. Digitalisasi dan inovasi data secara *end-to-end*, mulai dari input data yang terstruktur dan dengan teknologi *big-data*, pemrosesan metadata, penyimpanan dalam *data lake*, pengelolaan *data analytics* dan *data scientists*, hingga pemanfaatan aplikasi yang mendorong *customer experience* dan inovasi dalam analisis dan kebijakan. *Ketiga*, pembangunan platform

Gambar 5.14. Bank Indonesia *Digital Business Process Reenginering*

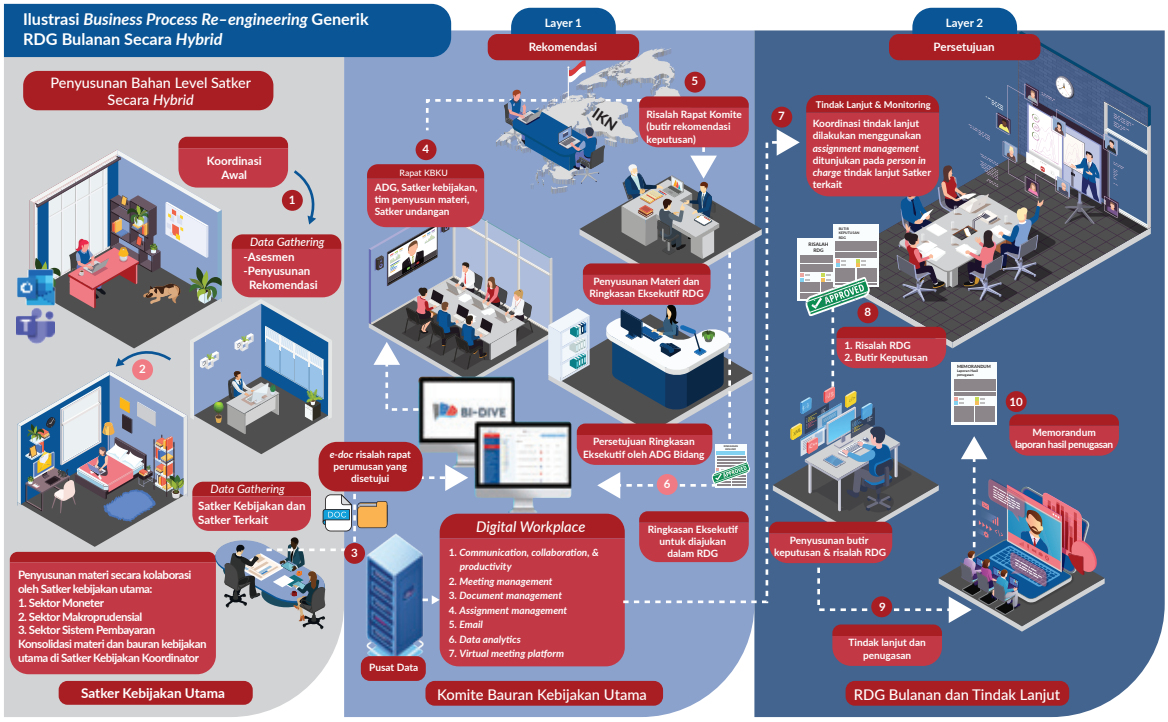

Sumber: Bank Indonesia

teknologi yang memungkinkan digitalisasi dan inovasi data serta digitalisasi proses kerja kebijakan dan kelembagaan tersebut. Dalam hal ini, platform teknologi *omni*, yang memungkinkan sejumlah aplikasi inti dapat saling terkoneksi dan terintegrasi dengan didukung keamanan siber yang memadai, akan dikembangkan. Untuk mewujudkan transformasi digital tersebut, penyempurnaan organisasi telah ditempuh dengan melakukan reorganisasi satuan kerja yang ada menjadi 3 (tiga) departemen baru, yaitu Departemen Pengembangan dan Inovasi Digital, Departemen Digitalisasi dan Inovasi Data, serta Departemen Layanan Digital dan Keamanan Siber.

Transformasi sumber daya manusia (SDM) secara terencana, terprogram, dan transparan terus ditempuh untuk memperkuat kepemimpinan yang berintegritas, kompeten, profesional, *agile* terhadap perubahan, dan berperilaku mulia di Bank Indonesia. Keberhasilan transformasi SDM telah banyak dicapai sejak 2018 dengan perencanan SDM berbasis merit yang matang, manajemen karir yang jelas dan transparan, seleksi ketat pegawai kelompok potensial (*talent pool*) sesuai *person to job fit*, program kepemimpinan berjenjang dari *non-officer* hingga *officer* dan pimpinan tertinggi, program pendidikan dan latihan untuk pengembangan kompetensi teknis maupun beasiswa master dan doktor, yang semua didukung dengan pemberian remunerasi, fasilitas kesejahteraan, dan jaminan pascakerja yang kompetitif dengan pasar. Selain penguatan lebih lanjut berbagai program tersebut, transformasi SDM ke depan akan lebih difokuskan pada penguatan karakter kepemimpinan visioner dengan kemampuan "*strategic foresight leadership*" agar *agile* terhadap perubahan, dan perilaku budi pekerti sesuai nilai-nilai kebangsaan dan spiritual menurut agama masing-masing. Penguatan kompetensi lebih ditekankan pada kemampuan adaptasi terhadap digitalisasi, baik kompetensi teknis terkait *data analytics* dan *data scientist* maupun aspek perilaku dan pola pikir, serta penguatan eksposur kepemimpinan melalui koordinasi dan penugasan di lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri. Penguatan *Employee Value Proposition* (EVP) dan program budaya kerja BI-Prestasi, BI-Inovasi, BI-Digital, dan BI-Religi ditekankan pada upaya membangun kebanggaan, kreativitas, pengakuan, dan insentif bagi prestasi dan kolaborasi sebagai pemimpin dan pegawai Bank Indonesia. Yang tak kalah penting adalah pengembangan suasana, hubungan, dan fasilitas kerja yang lebih mendukung digitalisasi dan juga perilaku pegawai milenial, termasuk proses kerja *hybrid* yang akan terus dipertahankan.

Gambar 5.15. Transformasi Digital di Bank Indonesia

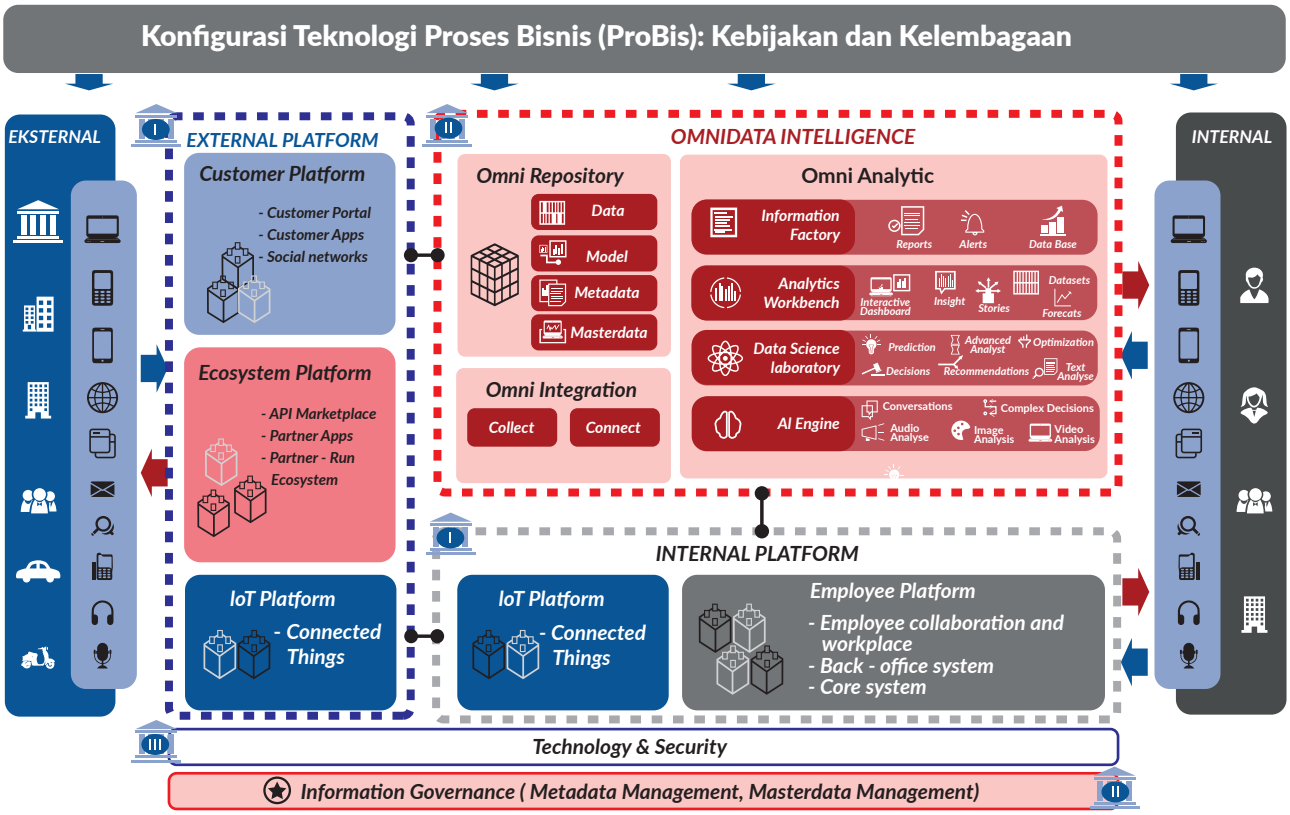

Sumber: Bank Indonesia